

ANALISIS PERANAN ORGANISASI REGIONAL ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN

Ditulis Oleh : Jose Maria (11.03.01-368)
Dibimbing Oleh : Moises Cardoso, Lic. CSH

ABSTRAKSI

Kawasan laut Cina selatan bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain kawasan laut Cina selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan laut Cina selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Laut Cina selatan merupakan kawasan yang berada di Asia tenggara, juga termasuk dalam Asia pasifik, kawasan tersebut memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga kawasan ini mengandung potensi konflik maupun potensi kerjasama. Kawasan ini di klaim oleh enam Negara yang bersekitar antara lain (Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan dan Cina). Posisi ASEAN sebagai Organisasi Independent yang menarik perhatian penuh terhadap kasus tersebut.

Teori dan konsep yang diambil untuk mendukung penelitian ini yaitu, teori peranan, teori organisasi, teori regionalisme, teori organisasi internasional, Organisasi ASEAN, teori konflik, Teori kepentingan, Teori diplomasi dan hukum laut (UNCLOS) 1982.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini terarah pada Kualitatif Deskriptif yang sifatnya mendeskripsikan dan menganalisa kejadian-kejadian berdasarkan data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Mengingat penulisan ini merupakan studi kepustakaan, maka data-data yang terkumpul didasari pada satu sumber data yaitu Sumber data sekunder berupa Buku cetak, artikel, elektronik (Internet). Untuk mengkaji data-data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis data Model analisis Milles Dan Huberman, model interaktif yang berbasis pada pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, bahwa Posisi ASEAN sebagai suatu organisasi yang melindungi kepentingan negara-negara anggotanya dan berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang ada di laut Cina Selatan, berbagai upaya telah dilakukan tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan hingga akhirnya ASEAN membentuk ASEAN *Regional Forum* sebagai forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Asia tenggara. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam, ASEAN mengeluarkan 3 tahap dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan yaitu *Confidence Building Measures*

(CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR). ASEAN sudah berapa kali melakukan perundingan baik bilateral maupun multilateral untuk menangani kasus laut Cina selatan tetapi belum mencapai solusi karena saat ini Cina meningkatkan anggaran militernya untuk mendominasi kepulauan tersebut dan Cina mengeluarkan peta yang digambarkannya berbentuk huruf U atau sembilang garis putus untuk mendominasi seluruh kawasan laut Cina selatan, dengan memotong garis batas laut internasional ZEE atau hukum UNCLOS 1982.

Konflik di laut Cina selatan merupakan *konflik of interest* dimana *konflik of interest* inilah yang memberikan hambatan bagi ASEAN untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga sampai saat ini belum adanya solusi. *Konflik of interest* tersebut memberikan dampak yang begitu besar bagi kawasan regional maupun dunia Internasional dimana konflik di laut Cina selatan bukan hanya melibatkan sebagian negara anggota ASEAN, Cina dan Taiwan tetapi juga negara besar lainnya seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan maupun Rusia.

Kata Kunci: Peranan Organisasi ASEAN dan Konflik Laut Cina Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam study hubungan internasional tidak hanya mengkaji isu-isu internasional yang besar, namun isu kawasan ataupun regional mulai menjadi pembahasan dan mendapat perhatian dari para ilmuwan hubungan internasional, salah satu kawasan yang sering menjadi perhatian yang menarik untuk dikaji yaitu kawasan Asia Pasifik, termasuk juga Asia Tenggara.¹

Kawasan laut Cina selatan bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik serkaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain kawasan laut Cina selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan laut Cina selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.²

Secara geografis laut Cina selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut yang batas selatannya 3° lintang selatan antara Sumatra selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwanke pesisir Fujian di Cina daratan, laut Cina selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia) dan Brunei Darussalam di sebelah utara Indonesia, di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia), Singapuradan di sebelah Timur Vietnam.³

Diperkirakan terdapat kandungan minyak bumi di kawasan laut Cina selatan, estimasi kandungan minyak di kawasan laut Cina selatan sebanyak 213 bbl (*billion*

¹<https://muayyustandi.wordpress.com>. Dede Muayyista S.

²<http://johnpau.wordpress.com>/Dieter Heintzig dalam “Konflik Laut Cina Selatan”

³www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm“Laut Cina Selatan”,

barrels). Seperti halnya minyak bumi kandungan gas alam di kawasan laut Cina selatan juga beragam. Selain sumber daya alam, laut Cina selatan sebagai jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan laut Cina selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar Negerinya. Jepang menggunakan kawasan laut Cina selatan sebagai jalur pengimpor barang dan Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu Amerika Serikat juga melakukan kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan laut Cina selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara.

Sengketa teritorial di laut Cina Selatan (*South China Sea*, atau SCS) ini diawali oleh klaim Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992.⁴ Hal ini dipicu oleh Cina pertama kali mengeluarkan peta yang dimasukkannya kepulauan Spratly dan Paracel sebagai bagian dari wilayahnya. Pada tahun yang sama Cina mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.⁵ Klaim tersebut mendapat respon dari negara-negara yang perbatasannya di laut Cina selatan, utamanya negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia.⁶

Di laut Cina selatan ada dua kepulauan yang mejadikan perebutan klaim oleh negara-negara yaitu: kepulauan Spratly dan Paracel, meskipun sengketa teritorial di laut Cina selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas

⁴Evelyn Goh (2005), "Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies", *East-West Center Washington*, Hal-31

⁵ Ibid.

⁶http://www.eastasiaforum.org/David_Arase (2011) , "China's Militant Tactics in the South China Sea", *East Asia Forum*,/china-s-militant-tactics-in-the-south-china-sea.

konfliknya. Sejak klaim Cina atas kepulauan di laut Cina selatan pada tahun 1974, Cina menganggap laut Cina selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika Cina menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam).

Pada tahun 1979, Cina dan Vietnam terlibat perang di perbatasan yang melibatkan angkatan laut kedua negara. Pada tahun 1992, 1995 dan 1997 bersamaan dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spratly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya.⁷ Konfrontasi Cina-Vietnam juga terjadi ketika eksplorasi minyak dalam wilayah perairan International tahun 1994.

Pada tahun 1995 Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam, Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara Cina dan Filipina, Pada tahun 1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam, tahun 2000 tentara Filipina menembaki nelayan Cina. Tahun 2001 tentara Vietnam menembakan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi pulau Spratly. Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik.⁸

Pada intinya, perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang besar dan juga perairan tersebut memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut Cina selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional. Konflik di kepulauan Spratly muncul akibat klaim yang dilakukan oleh 6 (enam) negara yaitu Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, dimana masing-masing negara memiliki versi dan historisnya masing-masing.

Upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan sudah dilakukan sejak tahun 1970-an baik melalui upaya-upaya bilateral maupun multilateral. Dalam upaya tersebut telah disepakati beberapa hal seperti kerjasama pengelolah wilayah kepulauan Spratly maupun pembagian sumber daya alam. Akan tetapi konflik ini

⁷Evelyn Goh, *Op.Cit.*, Hal-9

⁸Robert D Kaplan (2011), "The South China Sea Is the Future of Conflict", *Foreign Policy*, <http://www.foreignpolicy.com/articles/the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict?page=full>

belum selesai karena belum ada kesepakatan mengenai hak kepemilikan wilayah kepulauan tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional ikut berperang aktif dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah tersebut.⁹

Penyelesaian yang dimainkan oleh ASEAN yaitu melalui aspek diplomasi yang melibatkan negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Sampai saat ini konflik di laut Cina selatan belum mencapai titik penyelesaian karena adanya faktor yang sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan konflik tersebut, salah satu faktor utama yaitu *Konflik of Interest*. Konflik tersebut masih menjadi ancaman dan tentunya menimbulkan banyak perhatian bukan hanya dari dunia internasional namun kawasan regional itu sendiri.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana lazimnya bahwa konflik di laut Cina selatan melibatkan sebagian negara anggota ASEAN antara lain Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei Darusalam, maupun Cina dan Taiwan, dimana masing-masing negara melakukan klaim terhadap kepulauan Spratly dan Paracel karena kepulauan tersebut mengandung potensi yang begitu besar seperti: minyak bumi dan gas alam yang begitu berlimpah sebanyak 213 bbl (*billion barrels*), juga kawasan laut Cina selatan sebagai jalur perdangangan internasional atau jalur distribusi minyak dunia.

Maka dari itu penulis mengidentifikasi masalah melalui latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya bahwa potensi inilah yang menyebabkan hingga konflik yang terjadi di laut Cina selatan begitu berkepanjangan dan sampai pada titik ini peranan organisasi regional ASEAN belum menemukan solusi terhadap konflik tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pokok yang di ambil dalam Skripsi ini yang disusun sebagai suatu

⁹http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands_dispute “Spratly islands dispute.

pertanyaan yaitu sebagai berikut: Bagaimana ASEAN Mempermainkan Perannannya Dalam Menyelesaikan Konflik di Laut Cina Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai masalah-masalah dan isu-isu Internasional maupun kawasan regional khususnya konflik yang terjadi dilaut Cina selatan, serta menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana organisasi ASEAN mempermainkan peranannya dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat perilaku yang diharapkan dan dimiliki oleh yang berkedudukan di suatu masyarakat. Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.¹⁰ Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi, di dalam suatu sistem suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang disepakati bersama, apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu.

Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan **Mochtar Mas'oeid** menyatakan bahwa peranan atau (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi ini adalah perilaku yang diletakkan pada posisi tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.¹¹

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua pada 11 Agustus 1988 memberikan definisi bahwa peranan secara etimologi berasal dari kata dasar peran yang berarti bermain sebagai tugas atau bertindak. Sedangkan peranan yaitu bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain atau aktor, atau seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa peranan merupakan suatu tugas atau tindakan yang diambil dan dijalankan oleh seseorang atau organisasi dalam melakukan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu.

¹⁰Soerjono Soekanto. 2001. Sosiologi, Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persanda, Hal-268.

¹¹Mochtar Mas'oeid. 1989. Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

¹²Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua, 11 Agustus 1988. Hal-667

Menurut **Victor Situmorong** mengatakan bahwa peranan merupakan “Aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan peranannya.”¹³ Sedangkan menurut **Koenjaraningrat Soleman** mengatakan bahwa peranan adalah, “Segala cara yang berlaku dari individu-individu untuk memenuhi kewajiban dan untuk mendapatkan hak-hak tadi merupakan aspek yang dinamis dari status atau kedudukan cara-cara berlaku itu disebut peranan dalam bahasa asing yang dinamakan Role.”¹⁴

Menurut **W. J. S. Poerwadarminta** mendefinisikan arti peranan sebagai: “Seperangkat tugas yang diharapkan di miliki seseorang dalam masyarakat atau peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”¹⁵

Menurut **John Wahlke** mengatakan bahwa teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik;

1. Pertama, Ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.
2. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral¹⁶.

2.2. Teori Organisasi

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani *Organon-Alat*, Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana pra-sarana, data dan lain

¹³Victor Situmorong, himpunan pedoman pelaksanaan penanganan, peningkatan peran wanita dalam pembangunan bangsa, Erlanga, 1990, Hal-54

¹⁴Koenjaraningrat Soleman, Struktur dan proses sosial, suatu pengantar edisi I, 1990, Hal-88

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1976 Hal-383

¹⁶Mas' oedMohtar, Studi Hubungan Internasional, PAU-SS UGM, Yogyakarta, 1989. Hal-45

sebagainya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Hal pertama yang kita perlukan dalam study tentang organisasi-organisasi adalah definisi esplisit tentang apa yang dimaksud dengan suatu organisasi.

James L. Gibson menyatakan bahwa: “organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinan masyarakat tercapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri”¹⁷ organisasi-organisasi dicirikan oleh perilaku yang diarahkan kearah pencapaian tujuan, mereka mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien.

L. Furwick menyatakan bahwa organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa, organisasi-organisasi menciptakan karangka (setting) yaitu: banyak diantara kita yang melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita. **Stephen R. Robbins** seorang pakar tentang teori organisasi merumuskan organisasi sebagai berikut. “*An organization is a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals*”¹⁸. **Herbert G. Hicks** menyajikan rumusan berikut untuk sebuah organisasi “*An organization is a structured process in which person interact for objectives*”.

Adapun definisi tersebut berlandaskan sejumlah fakta yang merupakan ciri umum semua organisasi yaitu:

1. Sebuah organisasi senantiasa mencakup sejumlah orang.
2. Orang-orang tersebut terlibat satu sama lain dengan satu atau lain cara-maksudnya mereka semua berinteraksi.

¹⁷J. Winardi, S.E. Teori-Teori Organisasi & Pengorganisasian. Hal-13

¹⁸Ibid Hal-14

3. Interaksi tersebut selalu dapat di atur atau diterangkan dengan jenis struktur tertentu.
4. Masing-masing orang di dalam suatu organisasi memiliki sasaran-sasaran pribadi beberapa di antaranya merupakan alasan bagi tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ia mengekspektasi bahwa keterlibatannya di dalam organisasi tersebut akan membantunya mencapai sasaran-sasarannya.¹⁹

2.3. Teori Regionalisme

Dalam ilmu hubungan internasional regional banyak diartikan dan didefinisikan oleh beberapa ilmuwan, selain itu definisi tentang regionalisme akan banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam Study Kawasan. Menurut **Andrew Hurrell** Regionalisme dapat dilihat dari 5 fenomena yaitu: a). Interaksi antara masyarakat secara mandiri. b). Pembentukan identitas dan kesadaran moral. c). Kerjasama antara negara/pemerintah. d). Kerjasama antara negara dan pemerintah yang cenderung memperkuat proses intergasi. e). Membentuk aktor regional kohensi regional.²⁰

Selain itu, menurut **John Ravenhill** “*regions are social construction whose members define their boundaries*”, dalam arti kawasan merupakan konstruksi sosial atau rancangan yang sengaja bentuk supaya anggota yang terlibat dalam kawasan dapat menegaskan batas dari letak geografis negara anggota dari luar wilayah negara tersebut. Serta regionalism menurut **Ravenhill** adalah “*Refers to a formal process of inter-governmental collaboration between two or more state*” yaitu mengacu pada proses formal kolaborasi antar pemerintah antara dua atau lebih negara.

Organisasi regional merupakan suatu bagian dari dunia yang sama-sama diikat oleh kesamaan tujuan berdasarkan ikatan geografis, social, budaya, ekonomiataupun

¹⁹Ibid Hal-16

²⁰Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoritical Perspective,” dalam Louise Fawcett and Andrew Hurrell (eds.), *Regionalism in World Politics : Regional Organization and International Order* (New York : OxfordUniversity Press., In., 1995)2 Ben Rosamond, “New Theories of European Intgration,” dalam Michelle Cini, Hal-114

politik dan struktur formal yang memberikan arahan berbagai kesepakatan inter-governmental secara formal, meskipun tatanan bilateral bisa memenuhi definisi tersebut, namun perhatian akan difokuskan hanya pada tatanan yang melibatkan tiga anggota atau lebih, pada akhir tujuannya kerterbukaan organisasi bagi semua negara-negara tidak mempengaruhi ciri global mereka ketika tujuan-tujuan mereka mengacu pada nilai universalitas. Suatu organisasi regional harus dimaksudkan khusus pada kategori negara-negara yang cakupannya lebih rendah dari pada tatanan global.²¹

Menurut **T. May Rudy** ada beberapa hal yang dilakukan oleh organisasi internasional atau regional untuk memiliki *Legal Personalities* sendiri yakni:

1. Merupakan himpunan (keanggotaan) negara-negara yang bersifat tetap (permanen) serta dilengkapi oleh struktur organisasi yang lengkap. Dengan kata lain bukan sekedar komite ad-hoc yang biasanya berfungsi hanya sementara atau dalam jangka waktu tertentu.
2. Memiliki perbedaan, dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi, antara organisasi tersebut dengan negara anggota.
3. Adanya kewenangan hukum organisasi yang dapat diterima (oleh pihak lain) serta diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pada ruang lingkup internasional, bukan sekedar kegiatan didalam ruang lingkup nasional salah satu atau masing-masing negara anggotanya. Dengan kata lain diakui sebagai suatu kesatuan atau entitas tersendiri (bukan sekedar pengelompokan (beberapa negara) dalam transaksi atau hubungan dengan pihak lain.

Tipologi Organisasi Regional menurut **Lynn H. Miller** membuat klasifikasi organisasi regional yang didasarkan pada '*security orientation*'. Istilah ini jelas harus dibedakan dengan '*security capability*' yang lebih menekankan pada aspek militer. *Security orientation* lebih menekankan kepada keinginan untuk menjaga dan

²¹ Nuraeni S. Deasy Silvy. Arfin Sudirman Regionalisme Dalam Study Hubungan Internasional, penerbit Pustaka Belajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167. Hal-80

memelihara kestabilan ekonomi, meredakan ketegangan politik atau konflik-konflik social dan budaya, dengan tujuan itulah negara-negara melakukan kerjasama dan mewujudkan dalam sebuah organisasi sebagai wadah aktivitas bersama.²²

2.4. Regional Scurity Complex

Dalam menganalisa keamanan pada tingkat kawasan dan kekuasaan “*region and power*”, **Regional Scurity Complex Theory** (RSCT) digunakan oleh **Buzan** dan **Waever** mengenai RSCT menjelaskan bahwa biasanya ancaman dari jarak yang lebih dekat akan sering dating dibanding dari jarak yang jauh. Dalam teori atau konsep ini menurut **Buzan**²³ RSCT lebih mengacu pada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi dan desekuritisasi atau keduanya saling terhubung atau mengikat dan dapat menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain.²⁴ Selain itu teori ini juga dikenal dengan membedakan antar operasi global *Super Power* dan *Great Power* yang melampaui ruang lingkup dua daerah atau lebih serta RSC tunggal mempunyai lingkup yang besar dalam kekuatan regional.²⁵

Berbicara mengenai keamanan regional satu prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya pola relasi amity dan Enmity antar negara, Amity di sini dimengeri sebagai hubungan yang dekat antar negara, yang melahirkan adanya ekspektasi perlindungan dan dukungan. Sedangkan enmity dimengerti sebagai hubungan yang berlandaskan ketakutan dan kecurigaan,

Terdapat pula pola yang dibangun berdasarkan faktor sejarah dan budaya umum secara sosial, pola tersebut yaitu amity dan enmity antara negara yang membangun adanya RSC dan yang mempengaruhi oleh tatanan keamanan regional,

²²Lynn H. Miller. *Regional Organizaton and Subordinate Systems* dalam Louis J. Cantory dan Steven L.Spiegel.1970.*The International Politics of Regionas: A Comparative Approach*. New Jersey: Prentice, Inc

²³Barry Buzan dan Ole Waefer. *Regions and Power: The Structure of International Securit.* (Oxford:Cambridge University Press, 2003), Hal-44

²⁴Ibid Hal- 44

²⁵Barry Buzan. *People, States and Fear* .(London: Harvester Wheatsheaf, 1991), Hal-19

amity ini yaitu pola persahabatan atau hubungan yang dekat antar negara yang dapat menjalin dukungan dan persahabatan, sedangkan enmity sebagai permusuhan yang mengacu pada ketakutan dan kecurigaan antara negara.

Pada bagian ini kita akan membahas dua hal yang mendasar, yakni definisi regionalisme dan ciri-ciri regionalisme. Definisi dan ciri ini akan melengkapi satu sama lain, berhubungan ketidakjelasan definisi mengenai regionalisme sehingga kita berupaya melihat realita regionalisme melalui ciri atau karakter prosesnya.

Didalam hubungan internasional, regionalisme memiliki barisan study yang sangat erat dengan study kawasan atau (*Area Studys*) bahkan dalam aplikasi analisis istilah region (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpang tindih, oleh karena itu definisi tentang regionalisme akan banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam study kawasan.

Definisi regionalisme para ahli menurut **Masbaach** region atau kawasan adalah “pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Selanjutnya **Coulumbis dan Wolfe** dalam bukunya yang berjudul *introduction to international relation, power and justice*, terdapat 4 cara atau kriteria yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region yang sebenarnya sangat di tentukan oleh tujuan analisis kita ke empat kriteria tersebut adalah:

- 1) Kriteria geografis; mengelompokan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua sub benua kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asian
- 2) Kriteria politik militer; mengelompokan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi ideology dan orientasi politik, misalnya block sosialis, kapitalis, NATO dan non-block

- 3) Kriteria ekonomi; mengelompokkan negara-negara berdasarkan kepada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP dan output industry misalnya negara-negara industry dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
- 4) Kriteria transaksional; mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada dan pasar tunggal Eropa.²⁶

2.5. Teori Organisasi Internasional

Konsep dasar organisasi internasional merupakan salah satu kajian utama dalam study hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional, pada awalnya organisasi regional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertip dalam rangkai mencapai tujuan bersama dan sebagai salah satu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjalin dalam konteks hubungan internasional.

Menurut **Clive Archer** dalam bukunya (*International Organization*) organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional, kata internasional diartikan dalam beberapa makna, *Pertama*, inter-governmental yang berarti inter-state atau hubungan antara wakil resmi negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *inter-governmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. *Ketiga*, hubungan antar suatu cabang pemerintah di suatu negara (Seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan dan badan Intelijennya) dimana hubungan

²⁶Nuraeni S. Deasy Sylva. Arfin Sudirman. Regionalisme Dalam Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar. Hal 1-6.

tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri tersebut trans-governmental. *Kempat*, hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.²⁷

Organisasi dalam kata internasional *organizations* sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization, dalam hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses sedangkan internasional organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang dicapai dalam suatu waktu tertentu.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya, organisasi internasional dalam pengertian **Michael Hass** memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. *kedua*, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.²⁸

Tujuan dari organisasi internasional adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus, koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan berbagai pemimpin atau yang dipimpin.

Jadi dalam arti yang kedua ini organisasi internasional mengacu ke arah perbedaan peranan informasi dalam lingkup dunia, karakteristik umum yang terdapat dalam

²⁷Anak Agung Banyu Perwita. dan DR. Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hal-91

²⁸ Ibid Hal-93

kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi, organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu; keanggotaannya bersifat sukarela, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode pelaksanaannya, badan konsulatif yang representatif dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian dan informasi.²⁹

Coulombis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan, kedua penempuh study hubungan internasional tersebut menyatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan yaitu:

1. *Global membership and general purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antara pemerintah dengan keanggotaan dengan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global membership and limited purpose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antara pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and general purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, social dan ekonomi.
4. *Regional membership and limited purpose organization* yaitu suatu organisasi regional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud dan tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, social dan politik.

Fungsi organisasi internasional menurut **A. L. Roy Bannet** antara lain:

²⁹ Ibid Hal-94

1. *To provide the means of cooperation among state in areas which cooperation provides advantages for oll or a largenumber of nation* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu manghasilkan keuntungan yang besar bagi seluru bangsa).
2. *To provide multiple channels of communication among governments so that area accoodation msy br explored snd easy accel will be available when Problem arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antara pemerintahan sehinga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan).³⁰

2.6. Oraganisasi ASEAN

ASEAN berdiri pada tahun 1967 ditengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah, pada awal pembentukanya ASEAN hanya terdiri dari lima negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Philipina, walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal bahasa, budaya, agama, geografi, entitas dan pengalaman sejarah, hubungan antara anggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. ASEAN tidak terbentuk dalam sebuah ruang kosong, sebaliknya ia telah didahului dengan berbagai upayah pembentukan organisasi regional yang lebih terbatas ruang-lingkup dan anggotanya.

Pembentukan awal dimulai tahun 1961 dengan dibentuknya Association of Southeast Asia (ASA), tetapi konflik yang pecah antara Philipina dan Malaysia, pada tahun tersebut menghancurkan upaya awal tersebut. Maphilindo kemudian muncul menggantikan ASA, yang merupakan kerjasama antara Malayasia, Philipina dan Indonesia, tetapi percobaan kedua ini berakhir dengan politik *konfrontasi* yang dilancarkan **Soekarno**. Sementara itu konflik antara negara berpenduduk Melayu (Indonesia dan Malaysia) dan negara berpenduduk mayoritas Cina (Singapura) juga

³⁰ Ibid Hal -97

pecah sebagai akibat dari pengorbanan awal sebelum terbentuknya organisasi regional yang lebih solid seperti ASEAN.³¹

2.6.1. Negara Anggota ASEAN

ASEAN benar – benar merupakan organisasi regional pertama yang berhasil dibentuk oleh lima negara yang merupakan anggota awal berdirinya ASEAN yaitu terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok negara pendiri dan kelompok negara yang menjadi anggota setelah ASEAN berkembang. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand adalah negara-negara pendiri ASEAN. Mereka yang memprakarsai pembentukan organisasi regional dan negara yang menjadi anggota setelah ASEAN berkembang yaitu Vietnam, Kamboja, Brunei Darusalam, Myanmar dan Laos.³²

2.6.2. Norma dan Prinsip ASEAN

Sepanjang sebilan tahun pertama sejak dibentuk merupakan saat yang penting dan menentukan karena sepanjang waktu itulah interaksi antara negara menjadi sumber nilai bagi pembentukan norma-norma yang kelak menjadi pondasi untuk keberlangsungan hubungan antara negara, menurut **Amitav Acharya** ada dua sumber nilai yang menjadi landasan pembentukan norma pada organisasi regional khususnya ASEAN. *Pertama*, sebuah organisasi seperti ASEAN dapat belajar dari organisasi regional lain atau organisasi dunia yang ada. *Kedua*, sumber juga didapatkan dari nilai-nilai social, politik dan budaya setempat. Perjanjian persahabatan dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional. Dalam pertemuan Bali tersebut negara-negara ASEAN sepakat untuk (1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah semua bangsa, (2) setiap negara berhak memelihara

³¹ Bambang Cipto, MA. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara April 2007 Penerbit : Pustaka Belajar Celebana Timur UH III/548 Yogyakarta. Hal-13.

³² Ibid Hal -16

keberadaannya dari campurtangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar, (3) tidak mencampuri urusan dalam negara lain, (4) menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai, (5) menolak ancaman kegunaan kekerasan.

Menurut **Acharya** ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku organisasi regional. Terdapat paling tidak empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN. *Pertama*, menentang penggunaan kekerasan dan menutamakan solusi damai. *Kedua*, otonomi regional, *Ketiga*, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. *keempat*, menolak pembentukan aliansi militer dan menenkankan kerjasama pertahanan bilateral.³³

Norma – norma yang diharapkan dapat mengatur dan akhirnya membentuk hubungan damai antara negara anggota tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Tetapi melalui berbagai proses dan keputusan yang dikemudian hari menjadi pegangan bagi negara anggota ASEAN. Salah satu norma terpenting tersebut adalah Deklarasi Kuala Lumpur yang disepakati oleh kelima negara anggota. Dalam deklarasi tersebut antara lain disepakati bahwa ASEAN menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan jalan damai dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul di antara negara anggota.³⁴

ASEAN juga berusaha meneguhkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai zona perdamaian, kebebasan dan Netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). pernyataan tentang netralitas ASEAN ini didasari pada keinginan negara-negara anggota yang diprakarsai Malaysia untuk menjaga netralisasi ASEAN dari campur tangan negara-negara luar. Dengan pernyataan ini diharapkan negara-negara luar akan menghormati posisinya sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral dan oleh karenanya tidak memihak kepada negara lain manapun. ZOPFAN juga didorong

³³Ibid Hal-22

³⁴<http://www.aseansec.org/1215.htm>

oleh keinginan kuat untuk menigkat otonominya sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan Luar.³⁵

2.6.3. Tujuan Pembentukan ASEAN Menurut Deklarasi Bangkok

Pembentukan ASEAN menurut Deklarasi Bangkok, bertujuan untuk:

1. Mempererat pertumbuhan ekonomi, social dan pengembangan budaya melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkuat tatanan masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum di antara negara-negara anggota serta mematuhi prinsip – prinsip sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain dalam masalah – masalah menyakut kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuann dan administrasi.
4. Memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan professional, teknik dan administrasi.
5. Kerjasama yang efektif dalam menigkatkan bidang pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi serta penigkatan taraf hisup rakyat.
6. Memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan menjajagi segala kemungkinan untuk bekerja sama secara lebih erat di antara para anggota.³⁶

2.7. Teori Konflik

Konflik adalah perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih dalam mencapai suatu tujuan tertentu, teori konflik realistik ini mengatakan bahwa konflik kelompok disebabkan kepentingan memperebutkan berbagai sumber

³⁵Op.Cit. Bambang Cipto. Hal-43

³⁶Op.Cit. Nuraeni S.Deasy Sylvy. Arfin Sudirman. Hal232-233.

(*resource*), ekonomi dan kekuasaan yang memang terbatas, maka untuk memperolehnya karena bersaing sehingga ada salah satu pihak yang menjadi pemenang dan pihak lain yang kalah. Sangat mungkin terjadi akibat persaingan yang bersifat *Win-Lose Orientation*, pada akhirnya berjuang pada perilaku kekerasan di antara mereka. Selain itu perilaku menurut teori ini bisa juga terjadi karena pertentangan nilai atau keyakinan di antara mereka.³⁷

Menurut **Hanson** konflik sebagai “Suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu diantara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi.”³⁸ Adapun sumber-sumber atau kondisi pemula (*antecedent conditions*) terjadinya konflik, yaitu antara lain:

- a. Ketidakpuasan
- b. Adanya tujuan dan berbagai kemungkinan sistem nilai yang berbeda-beda
- c. Terhambatnya komunikasi serta adanya kesalah pahaman
- d. Persaingan terhadap sumber-sumber yang terbatas
- e. Adanya frustasi atau kejengkelan
- f. Salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan
- g. Tidak menyetujui butir-butir peraturan dan kebijakan yang timbul.

Lewis A. Coeser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan estatus, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang tersediaanya tidak mencukupi, lebih lanjut **Coeser** menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan (*collectivities*), atau antara individu dan kumpulan.³⁹

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif, hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana

³⁷Anima, Indonesia, *Psychological Journal*, 2009, Vol 24, No. 2.

³⁸Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*. 2008. Hal-172

³⁹ *Ibid.* Hal-83

pembelajaran dalam memajemen suatu kelompok atau organisasi, Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak-pihak yang terkait.

Daniel Katz dan Robert L. Kahn telah memperbincangkan konflik peranan (*Role Conflict*) yang dialami oleh para individu, sewaktu mereka dikonfrontasi dengan dua macam tuntutan atau lebih yang tidak kompatibel (tidak sesuai satu samalainnya).⁴⁰ Menurut pandangan kontemporer, konflik bukan saja suatu hal yang tidak dapat dihindari, melainkan ia merupakan suatu kondisi yang perlu untuk orang-orang dan organisasi-organisasi supaya mereka dapat bersifat adaptif terhadap perubahan. Tingkat perubahan tertentu diperlukan bagi ketahanan dan pertumbuhan keorganisasian, dalam hubungan ini konflik dapat bermanfaat sebagai sebuah elemen yang menunjang perubahan tersebut, mengingat bahwa adanya peranan potensial yang bermanfaat dari konflik, maka menurut pandangan kontemporer konflik itu peril di “maneje.” Manajemen konflik (*Conflict Manegement*) mengandung arti bahwa konflik dapat memainkan peranan dalam rangka upayah pencapaian sasaran-sasaran secara efisien serta efektif, mengikat bahwa konflik keorganisasian dengan cepat dapat berskalasi dan merusak kultur organisasi, maka kegiatan manajemen konflik keorganisasian merupakan sebuah prioritas penting. Ada pendapat yang menyatakan bahwa manajemen konflik dapat mengandung arti “secara aktif mencari konflik atau menciptakan secara positif kondisi-kondisi yang mennyebabkan timbulnya konflik”

Adapun inti pandangan di belakang pernyataan konflik tersebut adalah bahwa setiap waktu dapat saja terjadi gejala dimana jumlah konflik dalam organisasi mungkin lebih rendah dibandingkan dengan jumlah konflik yang diperlukan untuk mencapai pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif. Maka dalam kondisi demikian diperlukan tindakan-tindakan manajemen guna meningkatkan tingkat aktual konflik, sehinga dicapai tingkat yang diinginkan. Seperti di utarakan oleh **Stephen**

⁴⁰J. Winardi, SE. Teori Organisasi & Pengorganisasian. PT RajaGrafindo Persada. Hal-267

Robbins “...a company void of constructive conflict is a company void of exerciment, diversity and viability.”

2.8. Teori Diplomasi

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “*diploma*”(Yunani) yang artinya sebuah kertas yang dilipat dua yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan dan semacamnya. Di dalam pembicaraan sehari-hari, diplomasi mempunyai arti yang berbeda-beda, praktik diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan luar negeri, kebijakan semacam itu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan keperluan pertahanan, adanya persekutuan dengan negara lain dan lain sebagainya.

Sir Victor Wellesley dengan jelas menyatakan “Diplomasi bukan merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerja sama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, kebijakan untuk menetapkan strategi diplomasi dan taktik.”⁴¹

Menurut **Brownlie** diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Diplomasi pada hakikatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antarnegara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, untuk itu diperlukan suatu seni dan kemampuan serta kepandaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya. Kemampuan untuk berunding itu harus dilakukan secara maksimal agar dapat dicapai hasil yang

⁴¹Suamryo Suryokusumo, S.H., LL.M. Praktik Diplomasi. Penerbit ‘Iblam’ Hal-7

maksimal pula dalam suatu sistem politik, dimana suatu perang mungkin bisa terjadi.⁴²

Menurut **Hans J. Margenthau** tugas- tugas diplomasi dapat dibagi dalam empat pokok:

1. Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuasaan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negarayang ingin menciptakan tujuan-tujuannya yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk berperang, karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.
2. Disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya.
1. Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan dalam tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat apakah kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak” maka harus dicari jalan keluar untuk merunjukan kepentingan-kepentingan tersebut.
2. Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan, dan bahkan ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya.⁴³

Oxford English Dicionary memberika pengertian tentang diplomasi yaitu, “*Diplomasi is the management of internasonal relation by negotiation the method by which these relationa are arjusted and managed by ambassadors and envoys, the business or art of diplomat*” diplomasi adalah bagaimana mengelolah hubungan internasional degan cara negosiasi, cara yang dilakukan dalam melakukan hubungan tersebut dilakukan dan dikelolah oleh duta, baik itu duta besar atu atase –

⁴²Ibid Hal-11

⁴³Ibid Hal-17

atase yang ada di atau tidak berada di bawah duta besar atau utusan yang merupakan seni dari diplomasi. Karena merupakan suatu seni, maka akan sulit menemukan standar- standar untuk mencapai keberhasilan atau ketidak berhasilan dari suatu diplomasi. Dinyatakan juga bahwa diplomasi akan berakhir dan kembali ke hukum rimba apabila komitmen yang telah dibuat, tetapi dilanggar dan disengaja langgar secara unilateral ataupun oleh para pihak.⁴⁴

2.9. Konsep Diplomasi Publik

Konsep diplomasi publik membawa dua implikasi pertama, publik sebagai objek dalam artian publik di negara-negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara, implikasi kedua adalah publik sebagai subjek, dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktivitas negara/pemerintah. Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam study hubungan internasional. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasidengan negara yang lain.

Diplomasi publik juga didefinisikan sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini dari publik maupun pemimpin di negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini juga terkait dengan proses komunikasi dari pemerintah sebuah negara kepada publik di negara yang lain dengan mengirim pesan tentang pemikiran atau kebijakan negara tersebut.

Untuk mengidentifikasi diplomasi publik **Humphrey Taylor** juga membedakan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dalam sudut pandangan yang lain. Diplomasi tradisional sering menggunakan "*Hard Power*" kekuatan militer dan ekonomi. Usaha semacam ini kadang-kadang dapat menemui keberhasilan, namun di sisi lain justru membuka kemungkinan timbulnya kebencian, ketakutan, atau ketidakpercayaan. Diplomasi publik menggunakan "*Soft Power*", dengan

⁴⁴Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Tahun Penerbit 2014, oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hal 160-161

menggunakan kebudayaan, pendidikan, kapabilitas militer maupun ekonomi. Tujuan utama dari diplomasi publik ini tidak hanya memunculkan atau membentuk sikap saling menghormati, namun juga menimbulkan ketertarikan. Disisi lain menjadi sulit untuk membedakan antara diplomasi publik dengan pembentukan Citra Negara atau *State Branding*.

Simon Alhot mengatakan bahwa jika diplomasi publik merupakan satu kajian penting dalam hubungan internasional untuk membangun negara, sedangkan *Nation Branding* lebih mengarah pada konteks studi pembangunan ekonomi dan banyak dilakukan oleh negara yang kurang terkenal, dengan kata lain, perbedaannya adalah pada tujuan politik dan ekonomi. Namun permasalahan lain yang kemudian muncul adalah tujuan antara politik dan ekonomi tidak bisah dipisahkan secara mudah. Dalam pandangan yang pertama diplomasi publik diketahui berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau fungsi utamanya adalah menjelaskan negara terkait dengan negara lain. Tetapi dalam era moderen saat ini kadang-kadang kebijakan ini mempengaruhi sektor ekonomi.

Simon membagi tahap perkembangan diplomasi dalam tiga tahap yaitu tahap pertama adalah para pelaku diplomasi publik secara sederhana menempati posisinya dalam pemerintah untuk menentukan beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil, tahap kedua adalah ketika fungsi dari aktor masih mendasar untuk menjuak kebijakan negara, namun lingkup para aktor ini semakin meningkat dan memiliki kewenangan lebih untuk mengatur kondisibentuk penyampaian isi dari kebijakan luar negeri inidan tahap terahir adalah diplomasi publik digunakan sebagai alat kebijakan luar negri dalam dua cara sekaligus, baik secara formal maupun informal. Dengan kata lain diplomasi publik digunakan sebagai instrument kebijakan daripada sebuah metode komunikasi.⁴⁵

⁴⁵Tonny Dian Effendi. Diplomasi Publik Jepang. Pengantar Naoko Saiki (Deputy Direktor Geral Jepang Institute of Internasional Affairs) Motoo Futura (University Of Tokyo) Bagian Dua.

2.9.1. Diplomasi Pertahanan Definisi dan Konsep

Saat ini pemahaman keamanan telah mengalami perubahan, negara tidak lagi memahami keamanan hanya sebatas ancaman yang sumbernya dari negara lain dan bersifat militer, isu yang berkembang dalam isu keamanan tidak lagi sebatas keamanan negara (*state security*) namun keamanan individu (*human security*). Dalam pemahaman keamanan non-tradisional isu yang berkembang dalam keamanan saat ini mulai dari keamanan pangan, lingkungan hidup (*global warming*) yaitu ekonomi. Ancaman yang didapat dari negara tidak lagi hanya dari negara lain saja, namun bersumber dari *non-state actor* dan bersifat *transboundary*.

Tidak ada definisi umum dari diplomasi pertahanan, namun diplomasi pertahanan selalu berkaitan dengan: pertama, aktivitas kerjasama yang dilakukan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai. Kedua, diplomasi pertahanan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih luas, mulai dari peran militer sampai peran non-tradisional seperti penjaga keamanan (*Peace Keeping*), penegakan keamanan (*Peace Enforcement*), mempromosikan *good-governance*, tanggap bencana, melindungi HAM, dll. Ketiga, berbeda dengan masa lalu, dimana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antara negara bahkan negara yang sedang bersaing.⁴⁶

Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri. Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) namun juga organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Inilah yang membedakannya dengan diplomasi militer dimana diplomasi militer fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi terkait isu-isu keamanan saja.

⁴⁶Bhubhinder Singh dan See Seng Tan, "Defence Diplomacy in South east Asia". From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia. 2011. RSIS. Singapore.

Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko dan biaya rendah, diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.

CotteyA.& Forste mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas dalam diplomasi pertahanan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Terjalannya hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan senior.
2. Penunjukan atasi pertahanan di luar negeri
3. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral
4. Latihan bersama antara personil pertahanan militer asing dan sipil
5. Penyediaan keahlian dan saran dalam kontrol demokrasi kekuatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer.
6. Pertukaran personil dan unit militer dan kunjungan kapal
7. Penempatan personil militer ataupun sipil di kementerian-kementerian pertahanan atau militer negara sahabat
8. Penyebaran tim pelatih
9. Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya
10. Latihan militer bilateral ataupun multilateral

Saat ini diplomasi pertahanan memiliki tiga peran utama yaitu:

1. Kerjasama strategis untuk mengurangi ketegangan antara negara-negara bersengketa maupun yang berpotensi konflik.
2. Mempromosikan hubungan sipil-militer.
3. Mendukung negara lain untuk memajukan kemampuan menjaga keamanan (*Peace Keeping*).⁴⁸

⁴⁷Dalam “Defence Diplomacy in South east Asia”. From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia” Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges. Evan A. Laksmana.

Frederick the Great pernah mengatakan “*diplomacy without force is like music without instrument*” (diplomasi tanpa kekuatan/paksaan adalah seperti musik tanpa instrumen). Lebih lanjut **H.J. Morgenthau** mengatakan bahwa diplomasi adalah otak dari kekuatan nasional, dan moral nasional sebagai jiwanya (*diplomacy is the brains of national power, as national morale is its soul*).⁴⁹

2.9.2. Konsep ‘*Soft Power and Hard Power*’

Hard power sebagai lawan kontras dari *Soft Power* merupakan cara mempengaruhi tindakan yang lain sesuai dengan keinginan yang menginginkannya dengan cara memaksa atau kekerasan. Kekerasan akan menimbulkan kekerasan yang lain sehingga hal ini akan menimbulkan konflik yang tak berujung. Untuk itulah dibutuhkan pendekatan lain terhadap kepentingan ini agar kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan, yakni *Soft Power*.

Power menurut **Josep S. Nye** adalah “kemampuan dalam mempengaruhi perilaku yang lain”. *Soft Power* adalah kemampuan dalam menjadi “menarik”, sehingga bisa bekerjasama dengan yang lain, sumber daya utama dari *Soft Power* adalah kebijakan luar negeri, budaya dan nilai atau norma-norma.⁵⁰ *Soft Power* mempengaruhi seseorang secara tidak langsung tanpa disadari oleh subjek tersebut, hal ini sudah menunjukkan bahwa *Soft Power* sangat selaras dengan pemikiran Studi Hubungan Internasional, yakni interaksi global yang tetap mengutamakan perdamaian sekalipun terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Penyebaran Hinduism dan Budhism ke Asia Tenggara merupakan investasi emas India melalui *Soft Power* yang sudah terjadi pada abad pertama, sekarang seolah merupakan momentum bagi India untuk memanen keuntungan dari hal

⁴⁸Ibid

⁴⁹Konsepsi MIDLIFE adalah pandangan dari J. Boone Bartholomees Jr (dkk) dari U.S. ArmyWarCollege yang kini dikembangkan oleh Amerika Serikat

⁵⁰Siswo Pramono. 2011. Resources of Indonesian Soft Power Diplomacy. Jakarta: Jakarta Post. Diakses dari :<http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/28/resources-indonesian-soft-power-diplomacy.html>.

tersebut. Seorang eksekutif yang cerdas mengetahui bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang bagaimana memerintah orang lain, tetapi juga memimpin dengan memberi contoh dan membuat orang lain tertarik untuk melakukannya.

Dengan mengkaji *Soft Power* diplomasi budaya ini kita bisa mengetahui dan lebih menyadari pentingnya langkah pendekatan ini untuk dilakukan hubungan internasional mengkaji hubungan antar negara dan sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik atau bahkan perang. Padahal diantara negara-negara tersebut terdapat kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan negara lain yang mau tidak mau ia harus melakukan interaksi dengan negara tersebut untuk mencapai keinginan dan kebutuhannya.

Menurut **Perspektif Realis** Negara kuat bisa melakukan apa yang mereka pantas lakukan terhadap negara lemah. Namun hal ini tentu akan sangat rawan menimbulkan konflik, tidak semua "*Hard Power*" segera mendatangkan apa yang dibutuhkan. Kadangkala *Hard power* yang tidak mampu membuat lawannya menuruti apa yang diinginkan malah akan memperpanjang proses dalam mencapai kepentingan tersebut. Untuk itulah sekarang ini lebih gencar dipromosikan diplomasi melalui budaya, ini merupakan salah satu interaksi dengan menggunakan *Soft Power*. Ketika seseorang mengagumi bahkan tergila-gila dengan suatu budaya, ia bukan hanya akan mencari tahu tentangnya, tapi bahkan akan menyebarkan, sehingga dikenal menjadi mode tersendiri bagi mereka. Budaya yang masuk akan dengan mudah mempengaruhi orang yang terobsesi tersebut.

Musni Umar salah seorang anggota forum Eminent Person Group (EPG) mengatakan pentingnya pendekatan *Soft-power* setidaknya dilandasi lima alasan.

1. Pendekatan kekerasan (*Hard Power*) tidak pernah bisa menyelesaikan suatu masalah, bahkan kekerasan cenderung memicu terjadinya kekerasan lain.
2. Pendekatan *Soft Power* lebih mudah dilakukan karena tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang merasa disakiti dan merasa dikalahkan.

3. Pendekatan *Soft power* akan melahirkan persaudaraan sejati yang sama-sama menenggang perasaan dan tidak saling menyakiti.
4. Pasti memberi manfaat yang lebih besar daripada pendekatan *Hard Power*.
5. Pendekatan *Hard Power* sebagai lawan daripada pendekatan *Soft Power*, dapat memberi pelajaran pada kedua bangsa, bahwa tidak ada yang untung kalau terjadi konfrontasi.⁵¹

Soft Power telah menjadi salah satu kunci dalam kepemimpinan dan Kemampuan untuk membuat orang lain tertarik dan melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa harus secara langsung memintanya, subjek tersebut akan melakukannya kendati itu bukan keinginannya dan ia sesungguhnya tidak ingin melakukan hal yang demikian itu.

2.9.3. Konsep ‘*Balance of Power*’

Perimbangan kekuatan (*Balance of Power*) bukanlah konsep yang presisi dan bukan pula konsep yang muda diukur, konsep tersebut telah muda di interpretasikan oleh para sarjana dan para kaun praktis di bidang politik internasional **Ernest Haas** dalam suatu karangan yang mungkin akan berkembang di masa depan, mengamcam bahwa konsep *Balance of Power* tersebut kabur untuk digunakan oleh para ilmuan politik. Dia menunjukkan bahwa konsep tersebut paling tidak secara ekstensif bisa digunakan dalam 8 versi yang saling berbeda yaitu:

1. Ekuilibrium sebagai akibat dari distribusi kekuatan yang seimbang diantara negara-negara bangsa;
2. Ekuilibrium sebagai akibat dari distribusi kekuatan yang tidak seimbang di antara negara-negara bangsa.
3. Ekuilibrium sebagai akibat dari dominasi salah satu negara bangsa (*Balancer*).
4. Suatu system yang relative stabil dan damai.

⁵¹Suryanto. 2011. Indonesia-Malaysia Perlu Diplomasi Soft Power. (Antara News: Jakarta) diakses dari <http://www.antaraneews.com/news/248100/indonesia-malaysia-perlu-diplomasi-soft-power>

5. Suatu system yang dirinci oleh ketidak stabilan dan perang.
6. cara lain untuk menyebutkan kakuatanj politik (*Power of Politics*).
7. Suatu dalil sejarah yang universal.
8. Suatu pedoman bagi para *Policy-Makers*.

Kecaman **Haas** ini memang dilakukan dengan baik sekali, namun kita tidak bisa membuang konsep *Balace of Power*, meskipun tidak presisi, karena konsep tersebut dekat sekali dengan inti politik internasional. Dalam memebahas tentang karya-karya tentang system *Balace of Power* seperti yang telah di praktetkan dalam berbagai veriasi sejak tahun 1648. Kita akan menggunakan *Balance of Power* dalam antrian yang bersifat deskriptif dan analistik dan sebagai alat bantu untuk memahami mekanisme peraturan internasional primitive. Untuk tujuan tersebut kita akan mengasumsikan empat prasyarat bagi eksistensi system *Balance of Power* yang telah dikemukakan dalam literatur-literatur hubungan internasional yaitu :

1. Suatu multiplisitas actor-aktor politik yang berdaulat yang muncul karena tidak adanya satu otoritas yang kuat, terpusat dan legitimate (absah) yang menguasai aktor-aktor tersebut.
2. Distribusi kekuatan yang relative tidak seimbang (yaitu antara lain: status, kekayaan, ukuran kapabilitas militer) di antara aktor-aktor politik yang membentuk system tadi. Distribusi kekuatan yang tidak seimbang itu bisa digunakan untuk membeda-bedakan negara kedalam tiga kategori yaitu: negara besar (*Great Powers*), negara menengah (*Intermediate Powers*), dan negara-negara bangsa yang kecil.
3. Persaingan dan konflik yang berkeseinambungan-namun terkendali di antara aktor-aktor politik yang berdaulat tadi, dikarenakan adanya presepsi bahwa dunia merupakan sumber-sumber yang langkaha beserta presepsi mengenai nilai-nilai lainnya.

4. Suatu pemahaman implisit di antara para pemimpin negara-negara besar bahwa kesinambungan distribusi kekuatan yang ada akan menguntungkan mereka.⁵²

Charles O.Lerche dan **Apdul Said** telah mencoba menghitung satu persatu atau mejumlahkan kapabelitas negara menurut komponen yang nyata terlihat (tangible) dan yang tidak nyata (intangible). Kami akan memulai pembahasan ini dengan cara yang sala.⁵³

2.10. Teori Kepentingan

Negara di dalam pemerintahannya dan dalam membangun atau mengembangkan negaranya baik itu internal maupun eksternal, hendaklah mempunyai suatu strategi dan taktik dalam mencapai visi dan misi suatu negara kedepan, suatu negara mempunyai alasan mengapa negara tertentu harus atau perlu melakukan hubungan luar negeri. Umumnya negara melakukan hubungan luar negeri karena itu memang takdir dan kewajiban yang sudah ada dan diterima oleh suatu bangsa untuk mengambil peran tertentu di dunia (*Sense Of Place And Purpose*). Alasan lainnya adalah karena ini merupakan suatu kepentingan, kepentingan nasional (*National Interest*) yang melebihi dari kepentingan apapun. Berbicara mengenai politik luar negeri dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Politik luar negeri dapat juga digunakan sebagai sarana penghubung antara negara satu dengan negara yang lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu, Politik luar negeri tidak hanya melihat masalah politik di dalam batas negara saja, tetapi juga membahas masalah atau isu-isu yang terjadi di luar batas negara yang ada hubungannya dengan suatu negara tersebut.

⁵² Theodore A. Couloumbis. James . Wolfe. Pengantar hubungan Internasional. Keadilan dan Power. putra abardin. Hal-44.

⁵³Ibid. Hal-96

Dalam definisinya secara tradisional, politik luar negeri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Foreign Policy* adalah alat suatu negara yang dipergunakan juga untuk memenuhi kepentingan nasional, kepentingan nasional berarti berdasarkan kepentingan warga negara, tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Tentunya setiap warga negara mengharapkan masa depan yang damai, kedamaian antar setiap negara di dunia.⁵⁴

Untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, beberapa kriteria dapat digunakan seperti, 1) Kriteria ekonomi: Berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap minyak, gas dan energi lain; 2) Kriteria ideologi: Mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan kepentingan nasionalnya; 3) Akumulasi *power*: Melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer; 4) Keamanan militer: Pada intinya, kepentingan suatu negara ada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*) bangsa dan keamanan nasional.

Teori kepentingan nasional dari **Charles O. Lerche** yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional dimana politik luar negeri tersebut dibuat lebih lanjut **Norman J. Padelford** menegaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi vital terhadap *National Independence Way of Life, Territorial Security and Economic Welfare*.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara, para penganut realist menyamakan kepentingan nasional

⁵⁴Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, 1958

sebagai upaya negara untuk mengejar *power* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain.

Menurut **Hans J. Morgenthau** didalam “*The Concept of Interest defined in Terms of power*“, konsep kepentingan nasional (*Interest*) yang didefinisikan dalam istilah “*power*” menurut **Morgenthau** berada diantara nalar, akal atau “*reason*” yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami dengan kata lain *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.⁵⁵

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat, selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya, kepentingan inilah yang **Morgenthau** berpendapat bahwa strategi diplomasi berdasarkan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut digunakan untuk mengejar “*power*” yang bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Menurut **Morgenthau** dengan memiliki *power* maka suatu negara dapat mengendali negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki *power*.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan atau kerjasama (*Cooperation*) karena itu kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional. Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan

⁵⁵Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, Hal-67

nasionalnya, kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep 'power' kepentingan 'interest' didefinisikan ke dalam terminologi *power*.⁵⁶

2.11. Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami perubahan secara revolusioner selama empat dekade terakhir dan khususnya selama setengah dekade terakhir selain dari pada hukum laut dan jalur-jalur maritim (maritime highways). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di Montego Bay – Jamaica oleh sejumlah negara besar (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketiga tentang hukum laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyusung suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut dibawah hukum konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut, mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas.

Dalam hal ini harus disadari bahwa siapapun tidak dapat melompat, dengan tanpa banyak melakukan pembahasan, kepada suatu analisis atas konvensi 1982 ini seakan-akan konvensi itu sendiri sudah cukup menjelaskan tentang rezim hukum internasional mengenai laut, dasar laut dan wilayah-wilayah maritim dewasa ini. Megutip pendapat seorang ahli sejarah terkenal **A.L. Rowse** "landasan dari semua perkembangan ilmu sosial adalah sejarah, dari sanalah ilmu-ilmu sosial itu menemukan baik dalam kadar yang lebih besar maupun lebih kecil, pokok permasalahan dan bahan-bahan verifikasi dan kontradiksi" pendapat ini berlaku terhadap hukum laut dengan penekanan khusus.⁵⁷

⁵⁶Antonius sitepu, Teori Realisme Politik Hans.J. Morgenthau Dalam studi Politik dan HI, Hal-56

⁵⁷J.G. STARKE Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Penerjemahan: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.Penerbit/perencanaan. Bidang Hukum Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BLHN). Hal- 322

Grotius merupakan salah seorang dari kalangan yang merasa sangat keberatan dengan adanya klaim-klaim kedaulatan luas ini keberatan-keberatannya itu terutama didasarkan atas dua landasan :

1. Tidak ada lautan yang dapat mejadi milik suatu bangsa/negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik dengan cara okupasi.
2. Alam tidak akan memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang serta yang sifatnya tidak dapat habis (exhaustable) dengan perkataan lain, laut terbuka/lepas adalah hak semua bangsa (res gentium) atau barang non-komersial (resextra commercium).

Berlawan dengan prinsip kedaulatan maritim, prinsip “kebebasan laut lepas”(atau”kebebasan laut terbuka”) mulai dikembangkan seperti dikemukakan oleh **Hall** sesuai kepentingan-kepentingan bersama dan nyata dari negara-negara maritim. Disadari bahwa demikian seringnya terjadi dan besarnya semua kesulitan yang menimpah semua negara yang mengajukan, klaim-klaim yang bertentangan terhadap bagian laut terbuka.⁵⁸

Konferensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa yang pertama diselenggarakan di Jenewa mulai dari tanggal 24 ferbruari 1958 sampai dengan 27 April 1958 dan tugas yang diselesaikannya dimuat dalam empat buah konvensi yaitu mengenai konvensi laut teritorial dan jalur tambahan, konvensi mengenai laut lepas, konvensi mengenai perikanan dan konservasi sumber-sumber daya hayati di laut lepas, dan konvensi mengenai landasan kontinen. konvensi-konvensi ini mulai berlaku berturut-turut tanggal 10 september 1965, 30 september 1962, 20 maret 1966 dan 10 juni 1964, dan hingga akhir tahun 1979, konvensi-konvensi itu telah ikut sertai, secara berturut-turut, oleh 45 negara, 56 negara, 35 negara dan 53 negara. konferensi telah mengesahkan sebagai tambahan sebuah protokol penandatanganan

⁵⁸Ibid. Hal-323

bebas-pilih yang berkaitan dengan penyelesaian wajib atas sengketa-sengketa (*Optinal Protocol of Signature concerning the Compulsory Settelement*) yang kemudian berlaku mulai tanggal 30 september 1962, yang hinga pengujung 1979 pesertannya mencapai 39 negara, meskipun telah tercapai kesepakatan dalam tingkat yang besar pada konferensi mengenai sejumlah besar pokok permasalahan penting, namun dua masalah yang masih belum berhasil menyelesaikan, yaitu lebar laut teritorial dan dan batas laut penankapa ikan, sesudah berakhirnya konferensi 1958, mejelis umum melalui resolusi umum yang yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 1958 meminta sekretari Jenderal perserikatan bangsa-bangsa untuk menyelenggarakan konferensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hukum laut yang kedua untuk memikirkan lebih lanjut dua masalah yang belum diselesaikan ini. lebih dari 80 negara diwakili pada konferensi perserikatan bangsa-bangsa yang kedua ini, yang dilangsungkan di Jenewa mulai dari yang dilangsungkan di Jenewa mulai dari tanggal 16 maret 1960 sampai dengan 26 April 1960 dengan hasil yang tidak begitu menyakingkan menyakut kedua permasalahan tersebut meskipun konferensi menyetujui suatu resolusi yang menegaskan perlunya bantuan teknik bagi penangkapan ikan.⁵⁹

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut, yang pertama dan kedua (lihat di atas) masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan, khususnya mengenai :

1. Lebar laut teritorial secara tepat.
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintas selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut teritorial.
3. Hak lintas dan terbang lingtasdalam hubungan dengan perairan kepulauan;

⁵⁹Ibid Hal-332

4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-espesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas keparawisataan.

2.11.1. Zona Tambahan

Mengenai zona tambahan pasal 33 (bandingkan pasala 24 konvensi 1958), menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dapat diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan dan perundang-undangnya menyakut bea-cukai, fiskal imigrasi dan seniter didalam wilayahnya atau laut teritorialnya, dan menghukum setip pelanggaran demikian, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur.⁶⁰

Selat-Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Bagian ke III konvensi (pasal 34-35) mengatur suatu rezim hukum internasional yang sama sekali baru berkenan dengan selat-selat yang baru digunakan untuk pelayaran internasional, yang menunjukkan sala satu presepsi besar dari UNCLOS.⁶¹

Perairan negara-negara kepulauan

Rezim baru lainnya dan yang satu ini merupakan segi utama dari konvensi, tercipta dalam bagian IV konvensi (pasala 46-54) untuk negara-negara kepulauan (archipelagic States) dan perairan negara-negara demikian. definisi-defisnisi ini sangat penting dalam kaitan ini baik istilah “kepulaun”(archipelago) maupun “negara-negara kepulauan” (archipelagic States) harus didefinisikan secara seksama. Pasal yang berkaitan dengan definisi itu yaitu pasal 46 menyatakan bahwa, istilah “kepulaun” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantara pulau-pulau tersebut dan wujud-wujud alamiah lainnnya yang wujud alamiaahnya satu sama lain demikian eratnya sehinga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah

⁶⁰Ibid. Hal-351

⁶¹Ibid

lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian (penekanan ditambahkan pada kata-kata ‘‘hakiki’’ (intrinsic) dan ‘‘secara historis’’ (historically). ‘‘Negara kepulauan’’ didefinisikan untuk memberikan arti ‘‘suatu negara yang seluruhnya (penekanan ditambahkan) terdiri dari satu atau lebih dari kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain’’⁶²

2.11.2. Zona Ekonomi Eksklusif

UNCLOS mungkin akan selalu diingat dalam sejarah hukum internasional sebagai yang melahirkan, atau paling tidak yang mengasuh sampai dewasa, konsep zona ekonomi eksklusif (ZEE). konvensi mengatur ZEE dalam bagian V, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 21 Pasal (Pasal 55-75). pembentukan suatu rezim yang dapat diterima untuk ZEE telah menyita banyak waktu UNCLOS, meskipun konsep ini sendiri telah siap untuk memperoleh persetujuan. Konsep ini telah menyebabkan terjadinya suatu revolusi di bidang hukum laut. Amerika Serikat meski bersikap oposisi terhadap konvensi namun melalui pernyataan presiden (presidential Proclamation) tanggal 10 maret 1983 (lihat dalam uraian sebelumnya) secara tegas mengakui dan memakai konsep ini.

Pertama definisi ZEE terdapat dalam pasal 55 dan 57 sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial, yang diukur (yaitu, 200 mil laut yang tidak diukur dari batas laut terluar dan laut teritorial). Kedua, di dalam zona ini, negara pantai yang berdamping tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam kedaulatan teritorial, tetapi hak-hak berdaulat untuk tujuan-tujuan eksplorasi, pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam ZEE dan yuridiksi, dengan mengingat hak-hak negara-negara lain, berkenan dengan perbuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan serta bangunan-bangunan, penelitian ilmiah kelautan,

⁶²Ibid Hal-353

perlindungan dan pelestarian lingkungan (Pasal 56). Hak-hak lain dirinci dalam bagian V lainnya, secara umum, di ZEE kebebasan tradisional di laut lepas, misalnya, pelayaran, penerbangan, dan peletakan kabel-kabel dan pipa tidak terpengaruh, tetapi dalam hal konflik-konflik mengenai hak-hak dan yuridiksi harus diselesaikan atas dasar keadilan dan dengan mempertimbangkan segala keadaan yang relevan (Pasal 54).⁶³

⁶³ Ibid. Hal 355

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris yaitu: *research*, yang di terjemakan *research* sebagai *riset*, *research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari” dengan demikian, arti sebenarnya dari *research* atau *riset* adalah “mencari kembali”⁶⁴. Metode peneliitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian “kualitatif” dengan pendekatan diskritif terhadap “peranan organisasi regional ASEAN dalam menyelesaikan konflik di laut Cina selatan”.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data Kualitatif

Jenis data yang di gunakan oleh penulis adalah data kualitatif Dalam penelitian data kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber (buku, majalah, internet, serta situs-situs lain yang berkaitan dengan judul), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan di lakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh, Seperti pengertian dari **Milles and Huberman** bahwa: *most serious and central difficultin the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate*. Artinya yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum di rumuskan dengan baik.

3.2.2. Sumber Data

Dalam menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari keterangan-keterangan yang terkait dengan judul, serta bahan bacaan lainyan seperti majalah, jurnal, buku, serta dalam internet, pada suatu perpustakaan, maka sumber

⁶⁴Moh.Nazir, Ph.D, metode penelitian, ghalia Indonesia, cet. Ke tujuh, oktober 2011. Hal-12

⁶⁵Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Penerbit ALFABETA, CV. Hal-2

utama adalah: kartu katalog perpustakaan dan buku referensi, serta sumber data sekunder lainnya yang berhubungan dengan judul yang di pilih.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menggunakan teknik study dokumentasi yang berhubungan dengan konflik di laut Cina selatan. Studi dokumenter ini akan dilakukan di perpustakaan melalui buku-buku dan internet, guna mendapatkan informasi tentang Peranan Organisasi Regional ASEAN dalam menyelesaikan konflik di laut Cina selatan, serta penulis menggunakan fasilitas dari situs internet khususnya situs resmi tentang konflik di kawasan laut Cina selatan dan juga literatur-literatur atau karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan judul yang diajukan oleh penulis.

3.4. Instrumen Penelitian

Jadi instrumen yang dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti, buku-buku cetak, jurnal ilmiah, situs internet dan lain-lain. Dalam demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas samasekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrumen”. Jadi peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif, dalam hal instrument penelitian kualitatif, **Lincoln and Guba** mengatakan bahwa: *“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We will see that other form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has produced”*⁶⁶

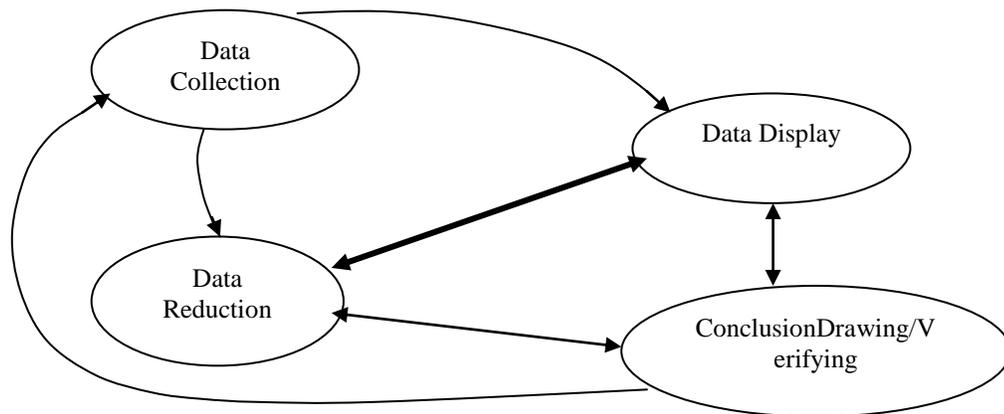
⁶⁶Ibid Hal-223

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis **Miles and Huberman** (1984) dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.⁶⁷

Gambar 1

Komponen dalam analisis data (Interactive Model)



Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B.

Keterangan

1. Pengumpulan Data, mengumpulkan data-data melalui buku cetak yang relevan dengan topik yang diteliti.
2. Reduksi Data, Dapat diartikan sebagai Proses pemilihan atau pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang penulis tulis di lapangan.
3. Sajian Data adalah kumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat

⁶⁷Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung. Hal-246

penyajian data, penulis akan memahami tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Adalah, Peneliti akan melakukan Verifikasi/Kesimpulan terhadap data yang telah dikumpulkan dari awal pengumpulan data hingga terakhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Mengenai Laut Cina Selatan

4.1.1. Profil Laut Cina Selatan

Laut Cina selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapuradan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwandengan luas sekitar 3.5 km² merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera, kepulauan laut cina selatan membentuk sebuah kepulauan yang berjumlah ratusan, Laut ini biasa disebut sebagai Laut Selatan saja di daratan Cina.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia) dan Brunei Darussalam, di sebelah utara Indonesia, di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura dan di sebelah timur Vietnam.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan laut Cina selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di laut Cina selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong) Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang dan Pasig.⁶⁸

Di laut ini ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi kebanyakan darinya di daerah kepulauan Spratly, kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya

⁶⁸“Laut Cina Selatan”www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm

menjadi kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m pulau-pulau kecil di laut Cina selatan yang membentuk kepulauan jumlahnya mencapai ratusan.

Laut dan pulau-pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni tersebut di klaim oleh beberapa negara klaim tersebut jelas tercermin pada beragam nama yang digunakan untuk menyebut pulau-pulau dan laut tersebut. Beragam nama digunakan untuk menyebut laut Cina selatan, hal ini mencerminkan klaim historis untuk menghegemoni laut tersebut.

South China Sea merupakan Nama dalam bahasa ingris yang paling sering digunakan untuk menyebut laut Cina selatan, sementara pelaut Portugis pada abad ke-16 menyebutnya *Mar da Cina* (Laut Cina), kemudian untuk membedakannya dengan wilayah perairan didekatnya namanya berubah menjadi laut Cina selatan. Dalam hal penamaan, Republik Rakyat Cina (RRC) menyebutnya dengan nama *Laut Selatan* saja, secara resmi pemerintah Vietnam menyebutnya *Bien Dong* (Laut Timur), nama *Bien Dong* digunakan pada peta resmi Vietnam. Bagian laut Cina selatan di bagian wilayah Filipina sering disebut *Dagat Luzon* (Laut Luzon) atau laut Filipina Barat karena keberatan dengan Nama Laut Cina Selatan sebab seolah-olah kawasan itu milik Republik Rakyat Cina (RRC).⁶⁹

Selain itu kawasan ini juga banyak dilalui oleh armada Angkatan Laut, baik berupa kapal tengker, maupun Armada-armada Angkatan Laut dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea yang melintasi laut tersebut, disamping itu wilayah ini juga merupakan salah satu lintas pelayaran yang paling strategis di dunia dan juga meliputi salah satu jalur maritim utama di dunia,

⁶⁹Ibid.

disamping juga merupakan kawasan yang menyimpan berbagai hubungan biodiversity kelautan terkaya di dunia.⁷⁰

Di dalam kawasan laut Cina selatan terdapat kepulauan Sparty dan Paracel yang tergolong titik rawan dalam soal klaim territorial, kepulauan Sparty dan Paracel merupakan kepulauan yang menjadi fokus perebutan antara negara-negara pengklaim (*claimantans*), tetapi yang lebih di sorot adalah kepulauan Sparty yang kemudian menjadi isu dominan internasional.⁷¹ laut Cina selatan diklaim sejumlah negara, dan didalamnya terdapat kepulauan Spratly yang telah lama menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan berbagai negara, Republik Rakyat Cina (RRC) berebut kepulauan Spratly dengan Filiphina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam dan Taiwan, Sementara kepulauan Paracel di klaim oleh Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan dan Vietnam. Selain saling klaim diantara negara-negara yang berlokasi di perairan laut Cina selatan tersebut juga terdapat kepentingan-kepentingan negara-negara besar seperti: Amerika Serikat, Rusia, Negara-negara Eropa barat, Jepang, Koreaan Taiwan kepentingan dalam hal keperluan pelayaran dan keperluan kandungan-kandungan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang terkandung di dalam wialayah laut Cina Selatan.⁷²

4.1.2. Ruang Lingkup Laut Cina Selatan

Secara geografis Laut Cina Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai yaitu: (Republik Rakyat Cina (RRC) Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filiphina). Serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan *dependent territory* yaitu Makau, luas perairan laut Cina selatan mencakup *Teluk Siam*, yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, serta *Teluk Tonkin* yang dibatasi Vietnam dan Republik Rakyat Cina (RRC).

⁷⁰“Potensi Konflik di Laut Cina Selatan”<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan>.

⁷¹ “Mencermati Sengketa Teritorial Laut Cina Selatan” <http://judiono.com/2009/01/05/mencermati-sengketa-teritorial-laut-cina-selatan/htm>,

⁷² KOMPAS edisi, selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata laut internasional merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis dan strategis, kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografis maupun kondisi potensi sumber daya alam yang dimilikinya, Selain itu kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional.

Di Laut Cina Selatan sendiri terdapat dua kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang yaitu: Spratly dan Paracel meskipun sengketa teritorial di laut Cina selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel (misalnya perselisihan mengenai pulau Phu Quac di teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam) namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya.

Diantara kedua kepulauan itu permasalahannya lebih terpusat pada kepulauan Spratly yang merupakan gugusan kepulauan yang mencakup bagian laut Cina selatan, yang diklaim oleh enam negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina dan Malaysia sementara kepulauan Paracel secara efektif masing-masing sudah berada di bawah kendali Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan.

Mengenai penamaan kepulauan di laut Cina selatan umumnya tergantung atas klaimnya, Taiwan misalnya menamakan kepulauan Spratly dengan Shinnenggunto, Vietnam menyebutnya dengan Troung Sa (Beting Panjang) Filipina menyebut Kalayaan (Kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan nama Itu Aba dan terumbu layang-layang sedangkan Cina lebih suka dengan menyebut Nansha Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Masyarakat internasional menyebutnya dengan nama Kepulauan Spratly yang berarti burung layang-layang.⁷³

Di dalam Laut Cina Selatan terfokus atas dua kepulauan yang menjadi sumber sengketa antara beberapa negara yang menginginkan kawasan laut Cina selatan, yakni

⁷³“Konflik Laut Cina Selatan” <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964.html>.

kepulauan Spratly dan Paracel, kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Spratly dan Paracel adalah dua rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara. Kepulauan Spratly dan Paracel memiliki cadangan besar sumber alam di seputar kepulauan itu, namun tidak banyak rincian tentang kekayaan mineral ini dan perkiraan didasarkan pada sumber daya mineral di dekat wilayah itu, Para pejabat Republik Rakyat Cina (RRC) memiliki perkiraan yang paling optimistik atas sumber mineral di sana.

Menurut data yang dikutip oleh Informasi Energi Amerika Serikat (IEA), Cina memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel-atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. Namun para ilmuwan AS memperkirakan jumlah minyak di sana 28 miliar barel. Sedangkan Menurut IEA, cadangan terbesar kemungkinan adalah gas alam. Perkiraanannya sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan yang dimiliki Qatar, Selain itu kawasan ini merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan ribuan orang yang tinggal di sekitarnya.⁷⁴

4.1.3. Batas – Batas Dari Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly merupakan kepulauan yang berada di laut Cina selatan, kepulauan ini berbatasan langsung dengan Negara Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, letak geografis kepulauan Spratly yang digambarkan oleh Dieter Heinzig adalah 4° LU – 11°31' LU dan 109° BT -117° BT.⁷⁵ Kondisinya di dalam Kepulauan Spratly kebanyakan hanya merupakan gugusan karang. Kepulauan Spratly terletak di sebelah Selatan Cina dan Taiwan, sebelah tenggara Vietnam, sebelah Barat Filipina, sebelah utara Indonesia, sebelah utara

⁷⁴. “Sengketa Kepemilikan Kawasan Laut Cina Selatan”http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.shtml.

⁷⁵. Dieter Heinzig dalam “Konflik Laut Cina Selatan” <http://johnpau.wordpress.com/2010/11/09/91>

Malaysia dan Brunei Darussalam.⁷⁶ Kepulauan Spratly memiliki luas diperkirakan 244.700 km² yang terdiri dari sekitar 350 Pulau.⁷⁷

Pulau-pulau yang terdapat di area tersebut tidak berpenghuni dan relatif tidak ada aktivitas ekonomi di daratannya.

Gambar II
Batas Batas Kepulauan Spratly



4.2. Penyajian Data

4.2.1. Klaim Negara-negara atas Kepulauan Spratly

a. Klaim Cina

Menurut sejarah yang ada Kepulauan Spratly sebenarnya telah diklaim seluruhnya oleh Cina sejak tahun 1876. Klaim ini bertahan hingga meletusnya perang dunia I. Pasca perang dunia I, kedaulatan menjadi masalah sensitif bagi negara-negara pada akhir abad 18. Pada waktu itu terjadi tumpang tindih klaim atas kepulauan tersebut oleh beberapa negara yaitu Perancis, Inggris dan Jepang yang melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitar laut Cina Selatan. Pasca perang dunia II tepatnya pada tahun 1971 Cina mengumumkan peta wilayah kedaulatannya termasuk kepulauan-kepulauan beserta gugusannya di kepulauan Spratly yang sebenarnya

⁷⁶. Blog hidayat purnama putra “uraian konflik kepulauan spradly”<http://hidayatpratama.blogspot.com/2012/03/uraian-singkat-tentang-kepulauan.html>

⁷⁷. Mukhammad Endry Saputra, “Diplomasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik di Kepulauan Spratly.” <http://esaputraangkasa.blogspot.com/2011/07/diplomasi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>

secara de jure belum jelas kepemilikannya. Cina mengklaim kepulauan Spratly atas dasar penemuan bukti-bukti sejarah yang ditemukan di gugusan pulau tersebut. Penemuan tersebut menerangkan bahwa pulau-pulau di wilayah Laut Cina Selatan ada di bawah pemerintahan **Dinasti Han** yang berkuasa sejak (206 SM-220 M).

Pada tahun 1988 Cina membangun konstruksi dan instalasi militer secara besar-besaran, secara de facto, Cina mengukuhkan kedaulatannya atas kepulauan Spratly dengan menempatkan pasukan militernya untuk berlatih sekaligus menjaga kepulauan tersebut. Sedangkan secara de jure pada tanggal 25 Februari 1992 pemerintah Cina mengeluarkan undang-undang tentang laut teritorial dan *Contiguous Zone* yang memasukkan kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Pada September 1996 Cina kembali menunjukkan ambisinya untuk memasukkan wilayah ini ke dalam wilayah maritim Cina.⁷⁸

Gambar III
Peta yang di keluarkan oleh Cina



⁷⁸[http://blogkspot.com/.Mukhamad Endry Saputra mahasiswa Prodi Ilmu Hub.Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta.Diplomasi Sebagai Upaya Penyelesaian konflik di Kepulauan Spratly.](http://blogkspot.com/.Mukhamad%20Endry%20Saputra%20mahasiswa%20Prodi%20Ilmu%20Hub.Internasional%20Universitas%20Slamet%20Riyadi%20Surakarta.Diplomasi%20Sebagai%20Upaya%20Penyelesaian%20konflik%20di%20Kepulauan%20Spratly.)

b. Klaim Vietnam

Berbeda dengan Cina, Vietnam mengklaim bahwa kepulauan Spratly adalah bagian dari wilayahnya yang sudah dieksplorasi sejak abad 17. Vietnam terlibat sengketa ini sejak sebelum bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam selatan. Pada tahun 1951 Vietnam selatan menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dalam konferensi San Francisco. Pasca reunifikasi, Vietnam juga tidak henti-hentinya menegaskan kembali tuntutannya atas kepulauan tersebut dalam berbagai kesempatan. Vietnam mulai menyatakan pemilikannya atas kepulauan Spratly pada tahun 1975 dengan menempatkan tentaranya di 13 pulau di Kepulauan tersebut. Sama halnya dengan Cina, Vietnam juga melakukan banyak aktivitas di wilayah tersebut. Angkatan laut Vietnam rutin melakukan patroli di wilayah perairan Kepulauan Spratly. Vietnam juga beberapa kali mengadakan latihan perang dengan menggunakan peluru hidup di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk membalas provokasi yang dilakukan oleh Cina.⁷⁹

Rangkaian kejadian ini kemudian mengakibatkan terjadinya beberapa kali konflik senjata. Konflik senjata pertama kali terjadi di wilayah laut Cina selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Untuk kedua kalinya, pada tahun 1988 konflik senjata antara Vietnam dan Cina kembali muncul. Konflik ini dilatarbelakangi oleh makin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di daerah perairan Laut Cina Selatan. Konflik ini menegaskan kembali klaim-klaim yang dilakukan Cina dan Vietnam atas kepulauan Spratly serta meningkatnya militerisasi Cina, Vietnam dan negara-negara pengklaim lainnya.⁸⁰

c. Klaim Taiwan

Taiwan memiliki kedekatan historis dengan dua negara besar yaitu Jepang dan Cina. Taiwan pada awalnya dijajah oleh Jepang yaitu sejak tahun 1895-1945, seperti

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

yang kita ketahui bersama bahwa hampir semua negara mengakui Taiwan merupakan bagian dari Cina (*one china policy*). Akan tetapi ideologi yang berbeda menyebabkan Taiwan tidak mau bergabung dengan Cina dan memilih untuk mendirikan negara sendiri. Taiwan sebagai negara yang terletak di sekitar Kepulauan Spratly juga ikut merebut hak atas kepemilikan kepulauan tersebut. Negara ini mengklaim dan menduduki kepulauan tersebut pada tahun 1956. Untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut, Taiwan menempatkan satu garnisun berkekuatan 600 tentara secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di pulau terbesar yang ada di kepulauan Spratly.⁸¹

d. Klaim Filipina

Filipina juga ikut mengklaim Kepulauan Spratly sebagai wilayah kedaulatannya, Filipina pernah menduduki gugusan pulau ini pada sekitar tahun 1970-an dengan alasan karena kawasan tersebut merupakan daerah yang tidak dimiliki oleh negara manapun, pernyataan tersebut berdasarkan pada rujukan perjanjian perdamaian San Francisco 1951 yang berisi tentang pelepasan hak Jepang atas Kepulauan Spratly, pada tahun 1968 Filipina mulai menempatkan marinir pada sembilan pulau di kepulauan Spratly untuk mengukuhkan klaimnya di wilayah tersebut.

Pada kurun waktu antara tahun 1970-an 2011 ada cukup banyak insiden yang melibatkan konfrontasi Filipina dengan Cina di Kepulauan Spratly. Insiden ini terkait dengan aktivitas nelayan Filipina di sekitar kepulauan tersebut yang seringkali dianggap melanggar wilayah kedaulatan Cina sehingga terjadi penembakan nelayan Filipina oleh marinir Cina. Insiden lain adalah mengenai kasus survei ilmiah Cina yang disalah pahami sebagai kegiatan militer.⁸²

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

e. Klaim Malaysia

Malaysia juga sempat menduduki pulau Spratly, Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya di kepulauan tersebut, Pada akhir 1977 Malaysia menempatkan sejumlah pasukannya menduduki sembilan pulau dari kelompok kepulauan Spratly. Pada tahun 1979, Malaysia mengklaim 11 pulau di bagian tenggara kepulauan Spratly berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia yang menggambarkan bahwa sebagian dari gugusan Kepulauan Spratly merupakan bagian dari negaranya. Pada 4 September 1983 Malaysia mengirim sekitar 20 Pasukan Komando ke terumbu layang-layang dan pada tahun yang sama, Malaysia melakukan survey dan kembali menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia.

Terkait dengan sengketa ini, Malaysia menawarkan beberapa solusi antara lain:

- a. Melakukan perbincangan bilateral untuk mencari penyelesaian dan mengelakkan konflik senjata yang tidak akan menguntungkan negara yang terlibat.
- b. Mengadakan dialog multilateral di antara negara-negara terlibat.
- c. Pemantauan secara bersama-sama hasil hidro karbon di bawah bumi sekitar laut Cina selatan.
- d. Pembentukan sebuah perusahaan bersama yaitu *Special Purpose Vehicle (SPV)* dengan menghormati kawasan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)⁸³

f. Klaim Brunei Darussalam

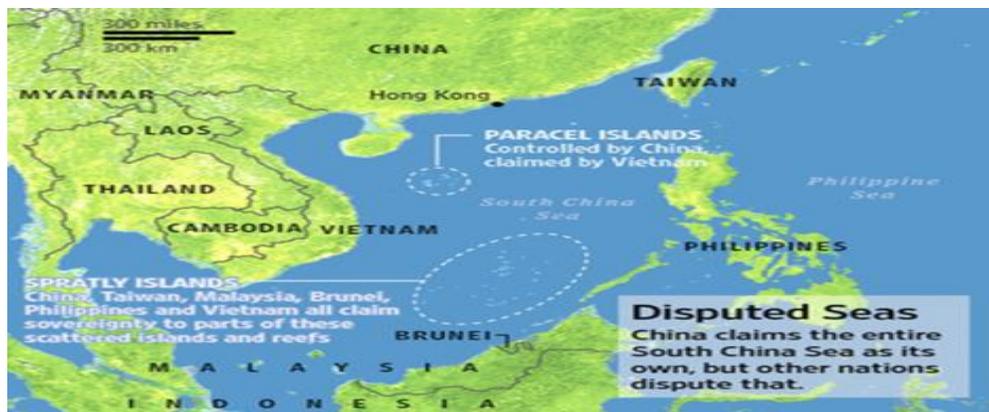
Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara yang menahan diri untuk tidak menempatkan angkatan bersenjata di wilayah Kepulauan Spratly, Brunei yang baru merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1984 juga ikut dalam sengketa di laut Cina selatan ini. Akan tetapi Brunei tidak mengklaim gugusan pulau dari kepulauan

⁸³. Ibid

Spratly, melainkan mengklaim perairan yang berada di sekitar kepulauan tersebut. Klaim Brunei hampir serupa dengan Malaysia yaitu didasarkan pada doktrin Landas Kontinental. Akan tetapi yang membedakannya adalah penarikan garis-garis batas yang ditarik secara tegak lurus dari dua titik terluarpada garis pantai Brunei Darussalam.⁸⁴

Gambar IV

Peta Klaim oleh Negara-Negara atas Kepulauan Spratly dan Paracel



4.2.2. Potensi Kepulauan Spratly yang mengakibatkan Sengketa

Kepulauan Spratly mempunyai potensi yang begitu besar yang salah satunya seperti minyak dan gas bumi yang cukup berlimpah, penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut data *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of China* (RRC) memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg), fakta tersebut menempatkan kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia.⁸⁵

⁸⁴. Ibid

⁸⁵. Wikipedia, "Spratly islands dispute," http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands_dispute

Letak strategis lintas laut kapal dan kekayaan sumber daya alam lainnya seperti ikan menjadi faktor yang juga sangat mempengaruhi sengketa dan konflik diantara negara-negara bersengketa, kapal-kapal penangkap ikan yang menangkap ikan disana menjadi salah satu penyebab konflik akibat perbedaan pemahaman dan prinsip antara beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut.

Setidaknya ada 6 negara yang mengklaim wilayah kepulauan spratly dan Paracel yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kelima negara diatas (enam negara tersebut kecuali Brunei Darussalam) mempunyai klaim dan penamaan terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly dan Paracel, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut di kepulauan Spratly sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif negara tersebut.⁸⁶

Karena besarnya potensi pulau ini menyebabkan konflik atas klaim dari negara negara yang telah di sebutkan di atas. Proses klaim setidaknya telah dilancarkan sejak tahun 1947. Ialah pemerintah Republik Rakyat Cina yang pertama kali mengklaim Laut Cina Selatan dengan membuat peta resmi yang tidak hanya mengklaim pulau-pulau, tetapi juga memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah Laut Cina Selatan.⁸⁷

Terdapat paling sedikit 3 hal yang membuat Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar dewasa ini dan masa dating, *Pertama*, laut Cina selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau yang tersebar di sekitarnya yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan seperti Cina (Republik Rakyat Cina –RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. *Kedua*, karena letaknya

⁸⁶. Op.Cit. Blog Hidayat Purnama putra

⁸⁷. Yulia Permatasari, “ Skripsi: Aspek Politik dan Keamanan dalam Konflik di Laut Cina Selatan.” [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1204/SKRIPSI%20BAB%20I%20-%20V.docx?sequence=2,](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1204/SKRIPSI%20BAB%20I%20-%20V.docx?sequence=2)

yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya, melalui wilayah perairan negara-negara yang paling sedikit di 3 kawasan penting yakni Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia-Pasifik maka, selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar laut Cina selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura bahkan Amerika Serikat (AS) berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di laut Cina selatan.

Aktivitas pelayaran yang meningkat yang menggunakan jalur lintas perairan internasional di laut Cina selatan dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di negara-negara ketiga kawasan penting itu, membuat peran laut Cina selatan semakin penting, dan baik negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara-negara luar sekaligus sensitif atas perubahan konstelasi kekuatan militer di berbagai negara tersebut dan juga negara luar kawasan yang berkepentingan yang secara khusus targetnya diarahkan ke sana. Sehingga setiap manuver kekuatan angkatan bersenjata terutama angkatan laut yang tampak provokatif atau ofensif dari setiap negara, terutama yang dikategorikan sebagai negara besar (*Big Power*) dan adidaya (*super power*) akan mengundang reaksi dari negara yang merasa terancam kepentingannya dewasa ini (rutin) dan jangka panjangnya.

Selanjutnya *ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia terutama Cina, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni laut Cina selatan. Baik Cina maupun AS dalam hal ini berupaya mengamankan kepentingan keamanan energi (*energy security*) dengan berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik, resmi/formal atau tidak resmi/informal untuk dikontrol bersama lewat upaya pencegahan diri (*self-restraint*) menghindari

provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu namun sekarang ini cenderung dilanggar dengan inisiatif unjuk kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang dan bahkan ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman.⁸⁸

4.2.3. Fakta Hukum Terkait Kepulauan Spratly

1. Kepulauan Spratly merupakan kepulauan yang berada di Laut Cina Selatan dengan letak geografis 4° LU – 11°31' LU dan 109° BT -117° BT.
2. Kepulauan Spratly memiliki luas diperkirakan 244.700 km² yang terdiri dari sekitar 350 Pulau
3. Diperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg) yang merupakan cadangan minyak terbesar keempat di dunia
4. Kawasan kepulauan ini merupakan kawasan lintas laut yang sangat strategis sehingga mampu mendukung perekonomian negara.
5. Karena letak yang strategis dan memiliki sumberdaya yang hebat, maka kepemilikan pulau ini memicu sengketa antara Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.
6. Mengenai penamaan kepulauan Spratly, Filipina menyebutnya Kalayaan (tanah kebebasan), Vietnam menamainya Dao Truong Sa, sedangkan Cina menyebutnya Nansha Qundao. Perbedaan nama dimaksudkan agar kepulauan tersebut terisyaratkan sebagai milik negara yang memberikan nama.⁸⁹

⁸⁸ Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. Judul Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. Cetakan Pertama, 2013

⁸⁹R.M. Jerry Indrawan, “Konflik Kepulauan Spratly”, diunduh dari <http://jurnal-politik.blogspot.com/konflik-kepulauan-separatly.html>,

7. Kapal-kapal penangkap ikan yang menangkap ikan disana menjadi salah satu penyebab konflik akibat perbedaan pemahaman dan prinsip antara beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut.⁹⁰
8. Proses klaim setidaknya telah dilancarkan sejak tahun 1947. Ialah Pemerintah Republik Rakyat Cina yang pertama kali mengklaim Laut Cina Selatan dengan membuat peta resmi yang tidak hanya mengklaim pulau-pulau, tetapi juga memberi tanda sebelas garis putus-putus di seputar wilayah Laut Cina Selatan. Meskipun cina belum melakukan pendudukan.

4.2.4. Peran Organisasi ASEAN

ASEAN sebagai suatu organisasi yang melindungi kepentingan negara-negara anggotanya yang berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang ada di laut Cina selatan berbagai upaya telah dilakukan tetapi belum mencapai suatu titik penyelesaian. ASEAN *Regional Forum* sebagai forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Asia tenggara. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam telah dikeluarkan 3 konsep dalam penyelesaian persengketaan laut Cina selatan yaitu *Confidence Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR).

ASEAN merupakan organisasi regional yang berfungsi untuk menciptakan dan menjamin kestabilan keamanan di wilayah Asia Tenggara memandang isu krusial. ARF sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah Ekonomi, Politik dan Keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di

⁹⁰Op.Cit. Blog hidayat purnama putra

kawasan Asia Pasifik.⁹¹ Namun persengketaan yang ditimbulkan dari konflik laut Cina selatan ini menimbulkan konflik bilateral (*bilateral dispute*) dan sengketa antarnegara (*multilateral dispute*) yang memungkinkan pecahnya konflik militer yang lebih luas. Hal inilah yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memasukkan masalah Laut Cina Selatan kedalam agenda resmi ARF. ARF sebagai suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference* yang ke-26, di Singapura pada tanggal 23-25 Juli 1993 diharapkan menjadi wadah dialog untuk menjembatani sengketa teritorial di laut Cina selatan. ARF berfungsi untuk menampung isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepedulian dan kepentingan umum. Selain itu diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia-Pasifik sebagai pendekatan strategis untuk resolusi konflik.

Pertemuan ARF yang pertama diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 25 Juli 1994. Namun agenda pertama yang membahas tentang konflik Laut Cina Selatan di dalam ARF adalah pada pertemuan ke-9 di laksanakan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 31 Juli 2002. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun direncanakan pula ASEAN SOM (*Senior Official Meeting*) akan membahas upaya percepatan implementasi DOC Laut Cina Selatan. Sejak hampir satu dekade terakhir pelaksanaan DOC South China Sea, yang dihasilkan dalam ASEAN SOM ke-8 di Hanoi, Vietnam, tahun 2002 lalu memang mengalami stagnasi.

Implementasi DOC itu terkendala selama hampir satu dekade terakhir lantaran belum adanya garis pedoman bersama. Isu sengketa wilayah kedaulatan di kawasan perairan laut Cina selatan antara sejumlah negara anggota ASEAN, Taiwan dan Cina masih terus menghangat. Pemerintah Beijing memang tampak bersikap lebih agresif

⁹¹Sekretariat Nasional ASEAN (1988), "ASEAN-Sealayang Pandang", Jakarta, Departemen Luar Negeri, hal.36-37

terkait persoalan ini. Hal itu kerap memicu kemarahan negara-negara lain yang juga mengklaim sejumlah kawasan di perairan tersebut. Belakangan pemerintah Filipina bahkan mengeluarkan pernyataan yang menyetujui kehadiran armada perang Amerika Serikat di sana. Sikap keras Cina kembali tampak dalam pernyataan juru bicara kementerian luar negerinya **Hong Lei** yang mengulang pernyataan sebelumnya bahwa kedaulatan Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel tidak dapat dipertentangkan. Pihak Cina mengklaim kawasan perairan berbentuk U yang luasnya mencapai 1,7 juta kilometer persegi. Kepulauan Spratly dan Paracel termasuk dalam kawasan yang diklaim Cina. Persoalan diyakini menjadi semakin bertambah buruk dengan kehadiran Angkatan laut Cina di wilayah yang diklaimnya tersebut.⁹² Oleh karena itu melalui ARF, negara-negara anggota menaruh harapan besar akan adanya kontribusi positif dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi sengketa teritorial di wilayah laut Cina selatan.

Namun dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan ARF sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 yang menghadirkan seluruh kepala negara, konflik ini tetap tidak menemukan titik temu penyelesaiannya. Peran ARF dengan memberi kontribusi yang lebih luas kepada kawasan Asia Pasifik untuk membahas masalah-masalah keamanan di kawasan secara komprehensif.⁹³

4.2.5. Penyelesaian Konflik secara Perundingan

a. Perundingan Bilateral

Perundingan bilateral merupakan salah satu cara yang dapat diambil untuk menyelesaikan suatu konflik. Beberapa kalangan menganggap bahwa perundingan bilateral merupakan cara yang efektif karena hanya melibatkan dua negara yang bersengketa. Karena hanya dua negara yang berunding, maka negara-negara dapat

⁹²Wisnu Dewabrata (2011), "RI upayakan percepatan DOC Laut China Selatan", *Kompas*, <<http://internasional.kompas.com/read/2011/06/08/08153820/RI.Upayakan.Percepatan.DOC.Laut.China.Selatan> >

⁹³ Tantangan ARF mendatang, <http://www.csis.or.id/Publications/OpinionsDetail.php?id=212>

lebih fokus pada apa yang disengketakan sehingga lebih cepat mencapai kesepakatan. Beberapa perundingan bilateral yang pernah dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa atas kepulauan Spratly adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1991, Cina melakukan perundingan bilateral dengan Taiwan mengenai eksplorasi minyak bersama yang berlangsung di Singapura.
- b. Pada tahun 1992, Cina mengadakan pertemuan bilateral dengan Vietnam dan menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok khusus dalam menangani sengketa perbatasan teritorial.
- c. Pada bulan Juni 1993, Malaysia dan Filipina melakukan hal yang sama dengan menandatangani perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun di wilayah yang disengketakan.
- d. Cina dan Filipina juga melakukan pertemuan untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah Spratly.
- e. Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam bertemu untuk membicarakan hak pengelolaan ladang minyak di sekitar Sabah.⁹⁴

Akan tetapi pada akhirnya perundingan bilateral juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada karena terjadi tumpang tindih antara hasil perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Selain itu proses kesepakatan yang dibentuk sama sekali tidak membahas kepemilikan kepulauan tersebut yang sebenarnya merupakan inti dari konflik tersebut. Keterlibatan 6 negara dalam sengketa ini semakin mempersulit langkah penyelesaian sengketa di wilayah ini sehingga diperlukan cara lain untuk menangani masalah ini.

b. Perundingan Multilateral

Selain melalui perundingan bilateral upaya-upaya penyelesaian konflik melalui perundingan multilateral seringkali ditempuh. Cara ini dianggap lebih efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan lebih dari 2

⁹⁴<http://luar-negeri.kompasiana.com/kepulauan-spratly-asean-vs-china>

negara. Dalam penyelesaian konflik di kepulauan Spratly dan Paracel negara-negara yang bersengketa juga mengupayakan penyelesaian konflik dengan menggunakan cara ini. Beberapa perundingan multilateral yang pernah dilakukan baik oleh negara-negara yang bersengketa maupun dimediasi oleh pihak di luar negara-negara tersebut antara lain:

- a. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang membahas tentang kawasan damai, bebas dan netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) atau ZOPFAN.
- b. Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976.
- c. Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF), yang dibentuk pada tahun 1994. Pertemuan ARF pertama kali dilangsungkan di Bangkok.
- d. KTT ASEAN V tahun 1995, yang menghasilkan traktat mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (*Treaty on South East Asia Zone-Nuclear Free Zone*).
- e. Technical Working Groups, Groups of Experts dan Study Groups, yang dipelopori oleh Indonesia. Dialog ini melibatkan aktor-aktor non-negara seperti ahli-ahli kelautan dan para akademisi. Dalam pembentukannya, tim yang tergabung mencari jalan terbaik bagi semua pihak yang bersengketa dengan menjalankan proyek kerjasama dalam hal monitoring ekosistem, keamanan navigasi, pelayaran dan komunikasi di laut Cina selatan. Dalam dialog ini kemudian disepakati proyek kerjasama dalam bidang penelitian keragaman hayati.
- f. Tahun 2002, ASEAN dan Cina menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea*.
- g. Pada bulan Maret 2005 Cina-Vietnam-Filipina menandatangani MoU kerjasama dalam bidang eksplorasi energi dan sepakat untuk menghentikan klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly.

- h. Pada tahun 2006 Cina-ASEAN Joint Working Group melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak(Cina dan ASEAN) berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.⁹⁵

4.3. Analisis dan Interpretasi Data

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar berupa minyak bumi dan gas alam yang terkandung di dalamnya dengan jumlahsekitar 17,7 miliar ton.⁹⁶Serta dikatakan memiliki potensi geografis, ekonomis, politis danestrategis, karena kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional).

Kawasan tersebut mengadung potensi konflik maupun potensi kerjasama, potensi inilah yang mennyebabkan hinga yangkonflik yang terjadi di laut Cina selatan,konflik yang terjadi di laut Cina selatan merupakan *konflik of interest* dimana *konflik of interest* ini melibatkan sebagian negara anggota ASEAN dan negara lain yang berada di sekeliling kawasan laut cina selatan yaitu RRC dan Taiwan sehingga konflik tersebut belum temukan titik penyelesaiannya.

Kawasan laut Cina selatanmasihdalam situasirawan danteggan, baik negara-negara anggota ASEAN maupun Cina dan Taiwan, saat ini meningkatnya anggaran militier Cina yang telah mendominasi di wilayah kawasan tersebut dan Cina merupakan negara *Super Power* yang dilihat dari segi ekonomi yang mendominasi dunia. Negara tersebut mempuyai agresif tinggi untuk memiliki kepulauan Spratly dan Paracel, meskipun betentangan dengan negara anggota ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Rusia maupun Amerika Serikat. Tetapi Cina berusaha keras untuk memiliki

⁹⁵<http://pengantar.diplomasi.blogspot.com/soft-diplomacy-sebuah-upaya.html>

⁹⁶Op.Cit.Wikipedia, "Spratly islands dispute,

wilayah tersebut dan saat ini Cina mendirikan pangkalan militer di kawasan laut Cina selatan khususnya di kepulauan Spratly.

Posisi ASEAN sebagai organisasi independen yang berdiri di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai hak penuh dalam menintervensi atau mengambil suatu kebijakan untuk menegaskan Cina agar tidak bisa melakukan hal tersebut di kawasan laut Cina selatan karena kawasan ini belum adanya hak kepemilikan atas kawasan tersebut, penyelesaian konflik laut Cina selatan tidak terlepas dari peranan organisasi regional ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang melindungi anggota negaranya yang terlibat dalam konflik, bahkan ASEAN mempunyai suatu prinsip yaitu menutamakan jalan damai, maka dari itu ASEAN sebagai elem utama dalam menyelesaikan konflik di laut Cina selatan, karena konflik laut Cina selatan melibatkan sebagian negara anggota ASEAN antara lain, Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei Darusalam.

Posisi Cina sebagai Negara *Super Power* baik dilihat dari sudut kekuatan militer maupun ekonomi, dengan kekuatannya membuat Cina mempertahankan keinginannya yaitu menguasai kawasan laut Cina selatan, Negara ini merupakan pertama yang klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel. Dengan kekuatannya yang besar membuat Cina semakin dominan dan saat ini Cina mendirikan pangkalan militer yang besar di kepulauan Spratly.

Untuk menganalisa dan membangun konsep terhadap kasus laut Cina selatan agar bisa mendapatkan suatu penyelesaian yang baik harus adanya diplomasi yang bijaksana, karena diplomasi merupakan seni berpolitik dan seni berunding. **Sir Victor Wellesley** dengan jelas menyatakan: “Diplomasi bukan merupakan kebijakan tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerja sama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya

bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik”’.

ASEAN telah memainkan peranannya dengan baik yaitu: mencari cara untuk menyelesaikan konflik di laut Cina selatan, upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN seperti membentuk suatu forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di kawasan Asia tenggara maupun Asia pasifik. ARF yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994, pertemuan ARF pertama diselenggarakan di Bangkok sebagai forum untuk menegosiasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan Asia tenggara, pada ARF kedua di Brunei Darussalam telah dikeluarkan 3 konsep dalam penyelesaian persekutuan laut Cina selatan yaitu *Confidence Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR).

Konsep *Confidence Building Measures* merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang dalam kondisi sebelum, selama maupun pasca konflik. Upaya ini ditunjukkan untuk mengurangi tingkat kecemasan, ketakutan terhadap penggunaan kekuatan militer, ataupun adanya ancaman dari pihak lawan dengan melakukan komunikasi, verifikasi dan transparansi dalam aktivitas masing-masing negara, terutama dalam isu sentral maupun vital yang dianggap menentukan skala ketegangan antar pihak yang berkonflik.⁹⁷

Tujuan akhir dari upaya ini adalah terbentuknya rasa kepercayaan yang penuh dan tinggi antara satu sama lain sehingga ketegangan dapat dikurangi bahkan dapat dieliminasi. Kepercayaan bersama sangat penting untuk mengurangi kemungkinan konfrontasi kekerasan. Keberadaan CBMs sangat strategis sebagai landasan dalam melakukan dialog negosiasi. Hal ini penting karena kecurigaan dan kecemasan yang meliputi gabungan suatu negara tidak akan membawa perjalanan yang lebih baik dan stabil diantara negara-negara tersebut.

⁹⁷ <http://www.beyondintractability.org>,

Konsep Diplomasi Preventif (*Preventive diplomacy*) atau diplomasi pencegahan yaitu tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencegah konflik secara dini dan untuk menegakkan perdamaian, diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan kumpulan aksi diplomasi, politis, militer, ekonomi dan kemanusiaan. Prinsip diplomasi preventif adalah membuat jarak dengan kepentingan langsung sebuah negara untuk memberikan bantuan moril maupun materil, diplomasi preventif lebih dari sekedar menyelamatkan dunia tetapi untuk mencegah agar tidak terisolasi dari masyarakat internasional.

Diplomasi ini memiliki tiga tujuan: 1) Mencegah konflik antara negara atau antara pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara. 2) Untuk mencegah perselisihan antara konflik terbuka. 3) Jika konflik pecah, memastikan penyebarannya sekecil mungkin.⁹⁸

Diplomasi yang dilakukan khususnya oleh negara-negara dunia ketiga untuk mencegah keterlibatan *Super Power* atau negara-negara besar dalam sebuah konflik lokal atau regional dengan cara berusaha menyelesaikan sendiri persoalan ketegangan atau konflik regional, seperti konflik laut Cina selatan yang melibatkan antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Cina dan Taiwan. ASEAN berusaha keras mencegah agar konflik tidak meruncing dengan keterlibatan aktif Cina, Jepang, Rusia, Korea Selatan maupun Amerika Serikat, tetapi konflik tersebut sudah menjadi konflik terbuka, karena sudah melibatkan banyak negara.

Untuk tujuan mencegah intervensi *Super Power* tersebut ASEAN membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai wadah konsultasi persoalan-persoalan keamanan agar bisa diselesaikan dengan “the ASEAN Way” yang artinya cara ASEAN. Mencegah keterlibatan *Super Power* atau negara besar lain dalam sebuah konflik sangat penting mengingat apabila ada keterlibatan mereka konflik akan

⁹⁸ Sukawarsini Djelantik. Diplomasi antara Teori dan Praktik. GRAHA ILMU. Edisi Pertama. Cetakan Pertama 2008. hal 162

meningkat intensitasnya, atau menjadi semakin sulit diselesaikan dan bahkan semakin luas skala konfliknya.

Menurut **Burton** Resolusi Konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan, Resolusi konflik dalam jangka panjang merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.⁹⁹Terdapat 3 prosedur pokok dalam penyelesaian konflik yaitu:

- a) Mediasi yaitu adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses perundingan tanpa terkait didalamnya kepentingan langsung dalam isu-isu yang menjadi pokok permasalahan.
- b) Perundingan bilateral atau multilateral diantara pihak yg terlibat langsung dalam konflik tersebut.
- c) Adanya keputusan dimana satu pihak independent memutuskan suatu penyelesaian melalui jenis imbalan tertentu. Resolusi konflik diusahakan untuk melihat dan masuk keakar sebuah permasalahan agar masalah tersebut tidak meluas dan melebar.

Dalam kasus laut Cina selatan resolusi konflik yang digunakan yaitu melalui mediasi,dengan adanya campur tangan ASEAN dalam penyelesaian konflik di kepulauan Spratly dan Paracel diharapkan mampu memecahkan masalah serta menangani dampak yang muncul akibat konflik tersebut dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak berpengaruh terhadap hubungan bilateral negara yang berkonflik dan stabilitas keamanan di kawasan laut Cina selatan.

ASEAN sebagai mediator berunding langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri agar tidak terprovokasi atas tindakan arogan yang dilakukan

⁹⁹www.scripps.ohiou.edu,

oleh salah satu pihak, seperti latihan-latihan militer di wilayah sengketa tersebut meminta dan mencegah dilakukannya gencatan senjata, Upaya yang dilakukan ini adalah untuk mencegah adanya konflik terbuka yang bisa berarah kepada gencatan senjata dan dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Program-program CBMs dan PD yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan, berusaha diimplementasikan dan diaplikasikan oleh semua pihak, walaupun pada awalnya banyak kendala, tetapi seiring dengan waktu semua pihak berusaha melaksanakan program-programnya dengan baik sehingga ketegangan bisa direndakan dan timbul saling pengertian dan kesepahaman diantara mereka. Pihak-pihak yang terkait juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikan persengketaan secara multilateral melalui ASEAN Regional Forum dan menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam penyelesaian persengketaan laut Cina selatan khususnya kepulauan Spratly dan Paracel yang juga mempererat hubungan diantara Cina, Taiwan dan negara-negara ASEAN baik dalam kerjasama militer dari kekuatan-kekuatan militer yang ada di wilayah laut Cina selatan juga kerjasama dalam pengelolaan bersama kekayaan-kekayaan alam yang berada di wilayah tersebut.

ASEAN suda berusaha memaikan peranannya dengan mengimplementasikan program - programnya seperti CBM dan PD, sehinga semua negara yang terlibat dalam konflik tersebut sepakat untuk melakukan suatu perundingan, baik perundingan Bilateral maupun perundingan Multilateral, tetapi ironisnya perundingan tersebut tidak bertahan lama, sehinga konflik tersebut terus berkelanjutan hinga saat kini belum adanya titik penyelesaian karena konflik yang terjadi di laut Cina selatan merupakan *konflik of ineterst*.

Norman J. Padelford menegaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi vital terhadap (*National independence, way of life, territorial security and economic welfare*). Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta merupakan dasar untuk

menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut Realist menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain.

Dalam kasus laut Cina selatan posisi Cina merupakan negara yang sumber ekonomi tumbuh pesat, baik di Asia maupun di Eropa, Cina juga dikenal dengan negara *Super Power*, baik di lihat dalam bidang ekonomi maupun militer sehingga dengan kekuatannya Cina meremehkan negara-negara kecil seperti negara anggota ASEAN, maka dari itu harus adanya diplomasi publik agar publik bisa memberikan perhatian terhadap masalah tersebut.

Diplomasi publik sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini dari publik maupun pemimpin di negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini juga terkait dengan proses komunikasi dari pemerintah sebuah negara kepada publik di negara yang lain dengan mengirim pesan tentang pemikiran atau kebijakan negara tersebut.

Untuk mengidentifikasi diplomasi publik **Humphrey Taylor** juga membedakan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dalam sudut pandangan yang lain. *Diplomasi Tradisional* sering menggunakan "*Hard Power*" kekuatan military, usaha semacam ini kadang-kadang dapat menemui keberhasilan namun di sisi lain justru membuka kemungkinan timbulnya kebencian, ketakutan atau ketidakpercayaan. *Diplomasi Publik* menggunakan "*Soft Power*" dengan menggunakanke budayaan pendidikan, kapabilitas maupun ekonomi. Tujuan utama dari diplomasi publik ini tidak hanya memunculkan atau membentuk sikap saling menghormati juga menimbulkan ketertarikan.

Namun di sisi lain menjadi sulit untuk membedakan antara diplomasi publik dengan pembentukan citra negara atau (*State Branding*). Di dalam konsep ini bahwa konflik yang terjadi di kawasan laut Cina selatan yang melibatkan enam negara dalam

menklaim atas kepulauan Spratly dan Paracel, sehingga keenam negara tersebut berusaha mati-matian untuk memiliki pulau tersebut, Cina merupakan negara yang mempunyai kekuatan yang besar baik militer maupun Ekonomi yang begitu dominan, ASEAN sebagai satu organisasi regional yang melindungi negara-negara anggotanya, yang terlibat dalam menklaim atas kepulauan tersebut, kedua pihak tersebut baik Cina, Taiwan maupun negara anggota ASEAN mempunyai kepentingan yang sama terhadap kawasan laut Cina selatan yang mengandung potensi yang begitu besar.

Dalam konsep ini ASEAN berdiri di tengah konflik tersebut dan konflik tersebut belum adanya titik penyelesaian, meskipun ASEAN berusaha keras untuk mencari jalan bagi konflik ini, tetapi belum adanya penyelesaian yang baik, maka suatu cara yang baik bagi ASEAN untuk mencari jalan keluar yaitu harus mengambil suatu kebijakan untuk mempengaruhi opini dari publik agar masyarakat internasional bisa memberikan tanggapan terhadap konflik tersebut.

Frederick the Great mengatakan “*diplomacy without force is like music without instrument*” (diplomasi tanpa kekuatan/paksaan adalah seperti musik tanpa instrumen). Beberapa teori maupun konsep Diplomasi yang telah diuraikan di atas bisa memberikan dan mendukung bagi organisasi regional ASEAN agar berperan lebih aktif untuk menemukan solusi damai, ASEAN merupakan elemen utama dalam penyelesaian konflik tersebut, maka dari itu ASEAN harus mengambil suatu kebijakan untuk mempengaruhi negara-negara yang mempunyai kepentingan besar terhadap kepulauan Spratly dan Paracel. Agar semua negara yang terlibat dalam konflik laut Cina selatan bisa mendapatkan penyelesaian yang komprehensif. ASEAN juga berusaha meneguhkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas atau *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Konflik yang ada dilaut Cina selatan telah berlangsung lama dan sudah menjadi perhatian yang serius dari organisasi regional ASEAN juga dari masyarakat internasional. Konflik tersebut melibatkan sebagian negara anggota ASEAN antara lain, Filipina, Malaysia Vietnam dan Brunei Darussalam maupun negara tetangganya seperti Cina dan Taiwan karena negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang sama terhadap kepulauan Spratly dan Paracel. Klaim setiap negara terhadap kepulauan Spratly dan Paracel dilandasi pada dasar historis yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu, kepulauan Spratly dan Paracel juga mengandung potensi sumber daya alam yang begitu besar.

Posisi ASEAN sebagai suatu organisasi yang melindungi kepentingan negara-negara anggotanya dan berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang ada di laut Cina Selatan, berbagai upaya telah dilakukan tetapi hasilnya tidak terlalu memuaskan hingga akhirnya ASEAN membentuk ASEAN *Regional Forum* sebagai forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Asia tenggara. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam, ASEAN mengeluarkan 3 tahap dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan yaitu *Confidence Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR).

ASEAN sudah berapa kali melakukan perundingan baik bilateral maupun multilateral untuk menangani kasus laut Cina selatan tetapi belum mencapai solusi karena saat ini Cina meningkatnya anggaran militernya untuk mendominasi kepulauan tersebut dan Cina mengeluarkan peta yang digambarkannya berbentuk huruf U atau sembilang garis putus untuk mendominasi seluruh kawasan laut Cina selatan, dengan memotong garis batas laut internasional ZEE atau hukum UNCLOS 1982.

Konflik di laut Cina selatan merupakan *konflik of interest* dimana *konflik of interest* inilah yang memberikan hambatan bagi ASEAN untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga sampai saat ini belum adanya solusi. *Konflik of interest* tersebut memberikan dampak yang begitu besar bagi kawasan regional maupun dunia Internasional dimana konflik di laut Cina selatan bukan hanya melibatkan sebagian negara anggota ASEAN, Cina dan Taiwan tetapi juga negara besar lainnya seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan maupun Rusia.

5.2. Saran

Berhubungan dengan hasil penelitian studi pustaka ini, maka disarankan kepada pembaca dan juga peneliti berikutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama bahwa :

1. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan awal bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan persengketaan yang ada di Laut Cina Selatan. Peneliti menyarankan bagi peneliti lain yang tertarik bisa mengambil penelitian pada sudut pandang yang lain dan membandingkannya dengan penelitian yang peneliti buat.
2. Bagi yang tertarik terhadap salah satu negara yang mengklaim, peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk bisa meneliti salah satu negara yang mengklaim di laut Cina selatan. Dilihat dari alasan, kepentingan dan berbagai hal lainnya yang memicu suatu negara mengklaim pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita. Dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Alex. Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, diterbitkan oleh Karya Harapan Surabaya. Anima, Indonesia, Psychological Journal, 2009, Vol 24, No. 2
- Barry Buzandan Ole Waefer. Regions and Power : The Structure of International Security. (Oxford:Cambridge University Press, 2003)..
- Coulombis Theodore A. dan James H. Wolfe. Pengantar hubungan Internasional. Keadilan dan Power. putra abardin.
- CIPTO BAMBANG. Hubungan Internasional di Asia Tenggara APRIL 2007 Penerbit :Pustaka belajar Celebana Timur UH III/548 Yogyakarta.
- Dian Effendi Tonny. Diplomasi Publik Jepang. Pengantar Naoko Saiki (Deputy Direktor Geral Jepang Institute of Internasional Affairs) Motoo Futura (University Of Tokyo) Bagian Dua.
- Djelantik Sukawarsini. Diplomasi antara Teori dan Praktik. GRAHA ILMU. Edisi Pertama. Cetakan Pertama 2008. hal 162
- Hudson Valerie M., *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, 1958
- Jemadu Aleksius, Politik Global Dalam Teori dan Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008,
- Lynn H. Miller. *Regional Organizaton and Subordinate Systems* dalam Louis J. Cantory dan Steven L. Spiegel.1970.*the International Politics of Regionas: A Comparative Approach*. New Jersey: Prentice, Inc
- Mas'eod Mochtar. 1989. Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
- M. Hudson, Valerie *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, 1958
- Nazir Moh, metode penelitian, Ghalia Indonesia, cet. Ketujuh, oktober 2011
- Norton, Paul N. dan L. Hunt, sosiologi, edisi terjemahan, Erlangga, 1994
- Nuraeni S. Deasy Silvy. Arfin Sudirman Regionalsime Dalam Study Hubungan Internasional , penerbit Pustaka Belajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
- Nurul Chintya Irada. Peranaan Regional Forum (ARF) Dalam Menjembatani Penyelesaian Konflik Laut Chiina Selatan Tahun 2002-2011.Journa Skripsi.
- Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1976.
- Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi. 2008.
- Phil. Poltak Partogi Nainggolan,. Judul Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. Cetakan Pertama, 2013

- Soekanto Soejono. 2001. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Situmorong Victor, himpunan pedoman pelaksanaan penanganan, peningkatan peran wanita dalam pembangunan bangsa, Erlanga, 1990.
- Soleman Koenjaraningrat, Struktur dan proses sosial, suatu pengantar edisi I, 1990.
- Supriyatno Makmur, Tentang Ilmu Pertahanan, Tahun Penerbit 2014, oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B. Penerbit Alfabra Bandung.
- Sitepu Antonius, Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam studi Politik dan HI,
- Singh Bhubhinder dan See Seng Tan, "Defence Diplomacy in South east Asia". From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia. 2011. RSIS. Singapore.
- Starke J.G. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Penerbit/perencanaan.
- Wirawan I.B. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma.
- Winardi, J. Teori Organisasi&Pengorganisasian. PT Raja Grafindo Persada.

Website

- <http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/28/resources-indonesian-soft-power-diplomacy.html>. Siswo Pramono. 2011. Resources of Indonesian Soft Power Diplomacy. Jakarta: Jakarta Post.
- <http://www.antaraneews.com/news/248100/indonesia-malaysia-perlu-diplomasi-soft-power-pada-26-mei-2011> Suryanto. 2011. Indonesia-Malaysia Perlu Diplomasi Soft Power. (Antara News: Jakarta)
- <http://johnpau.wordpress.com/2010/11/09/91> Dieter Heinzig dalam "Konflik Laut Cina Selatan",
- www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm "Laut Cina Selatan",
- <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm> Evelyn Goh (2005), "Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies", *East-West Center Washington*,
- <http://www.eastasiaforum.org//china-s-militant-tactics-in-the-southchina-sea> David Arase (2011) , "China's Militant Tactics in the South China Sea", *East Asia Forum*, Evelyn Goh (2005), "Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies", *East-West Center Washington*, h. 9
- http://www.foreignpolicy.com/articles//the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict?page=full Robert D Kaplan (2011), "The South China Sea Is the Future of Conflict", *Foreign Policy*,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands_dispute

*<http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> EIA (2008), "South China Sea", *US Energy Information and Administration*, "South China Sea Oil and Natural Gas", *Global Security*,*